



# Konsep: Logic Model, Penyusunan Rencana Kerja, RSPP dan SBK



# SISTEMATIKA

- I. KONSEP LOGIC MODEL
- II. SISTEM PENGANGGARAN
- III. KONSEP HARMONISASI RENJA DENGAN RPJMN DAN RENSTRA
- IV. KONSEP RSPP
- V. KONSEP SBK

# Permasalahan Kita Di Mana?

Perencanaan		Penganggaran		Pelaksanaan		Pertanggungjawaban		Pengukuran Kinerja
Dokumen Prencanaan		RAPBN		APBN		LKPP		LAKIN
RPJP			K/L		POK		NERACA	Performance Measurement (Laporan Kinerja)
RPJM	Renstra	RKA	UO	DIPA	TOR	LK	LO, LRA	
RKP	Renja		SATKER		RAB		LPE, CALK	
		TOR/RAB						
Logic Model		Pendekatan Penganggaran		Prinsip_Prinsip		Peny Akt Pemerintah		Pengukuran Kinerja
Akurasi		Efektivitas dan Efisien		Akuntabilitas		Laporan WTP		Tujuan Bernegara





# KONSEP LOGIC MODEL



## LOGIC

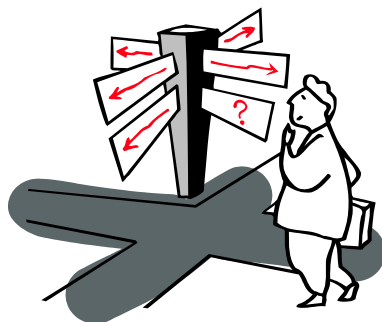
- Prinsip-prinsip penalaran
- Masuk akal
- Hubungan antar elemen satu dengan yang lain maupun antar keseluruhan elemen

## MODEL

- *Objek kecil yang mewakili objek lainnya, seringkali objek yang lebih besar (mewakili realita, tapi bukan realita itu sendir)*
- *Pola awal yang dijadikan sebagai rencana*
- *Deskripsi tentative dari sebuah sistem atau teori yang menjelaskan semua propertinya*

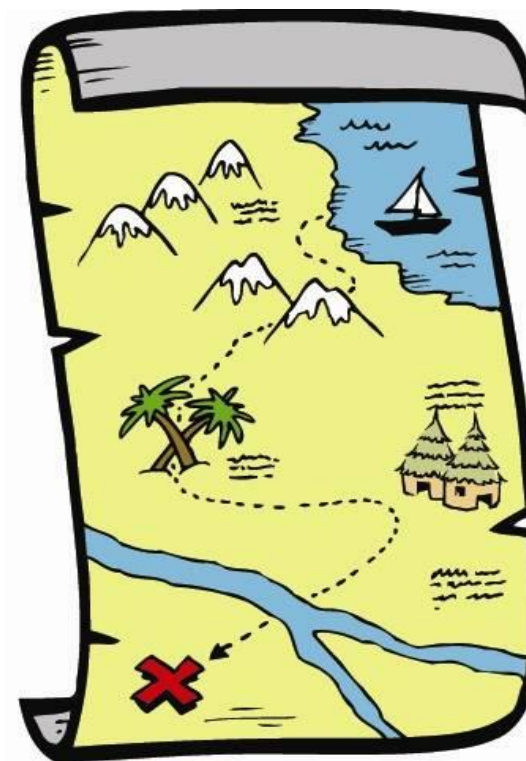


Logic model adalah sebuah cara berpikir...  
Bukan hanya sebuah gambar yang bagus



*“jika anda tidak tahu kemana  
anda pergi, bagaimana anda  
tahu kapan anda akan sampai  
di sana?”*

Yogi Berra

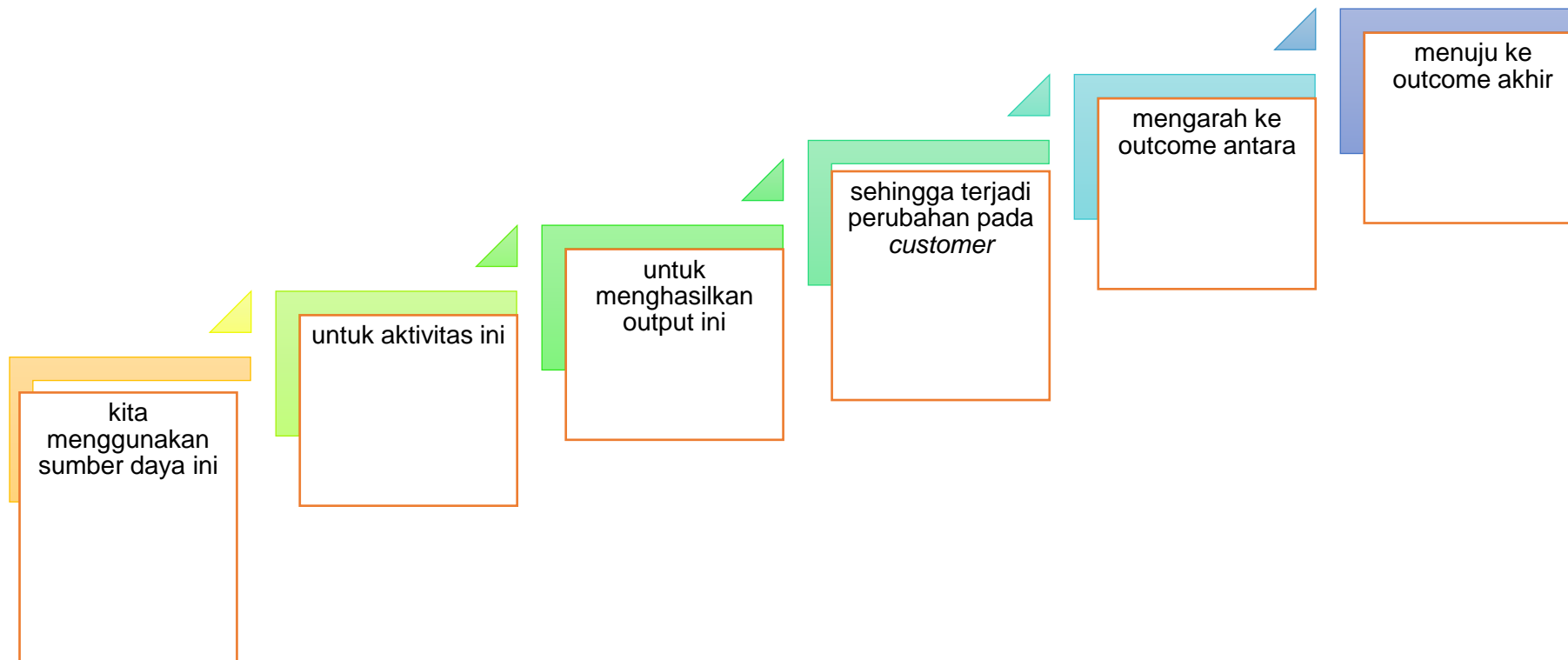


Logic model juga biasa disebut...

- Teori perubahan
- Aksi program
- Model perubahan
- Peta konseptual
- Peta Outcome
- Logika Program

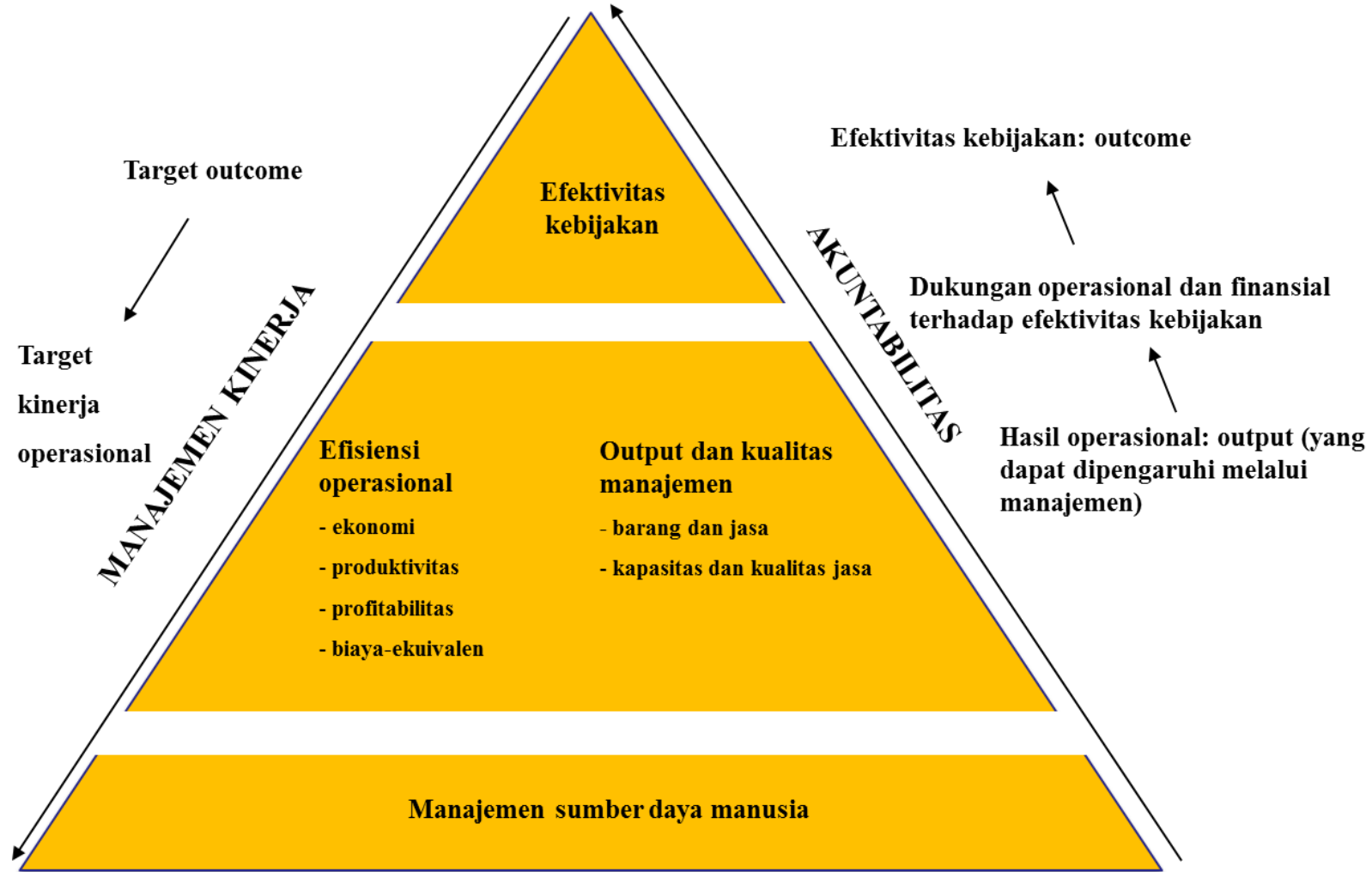


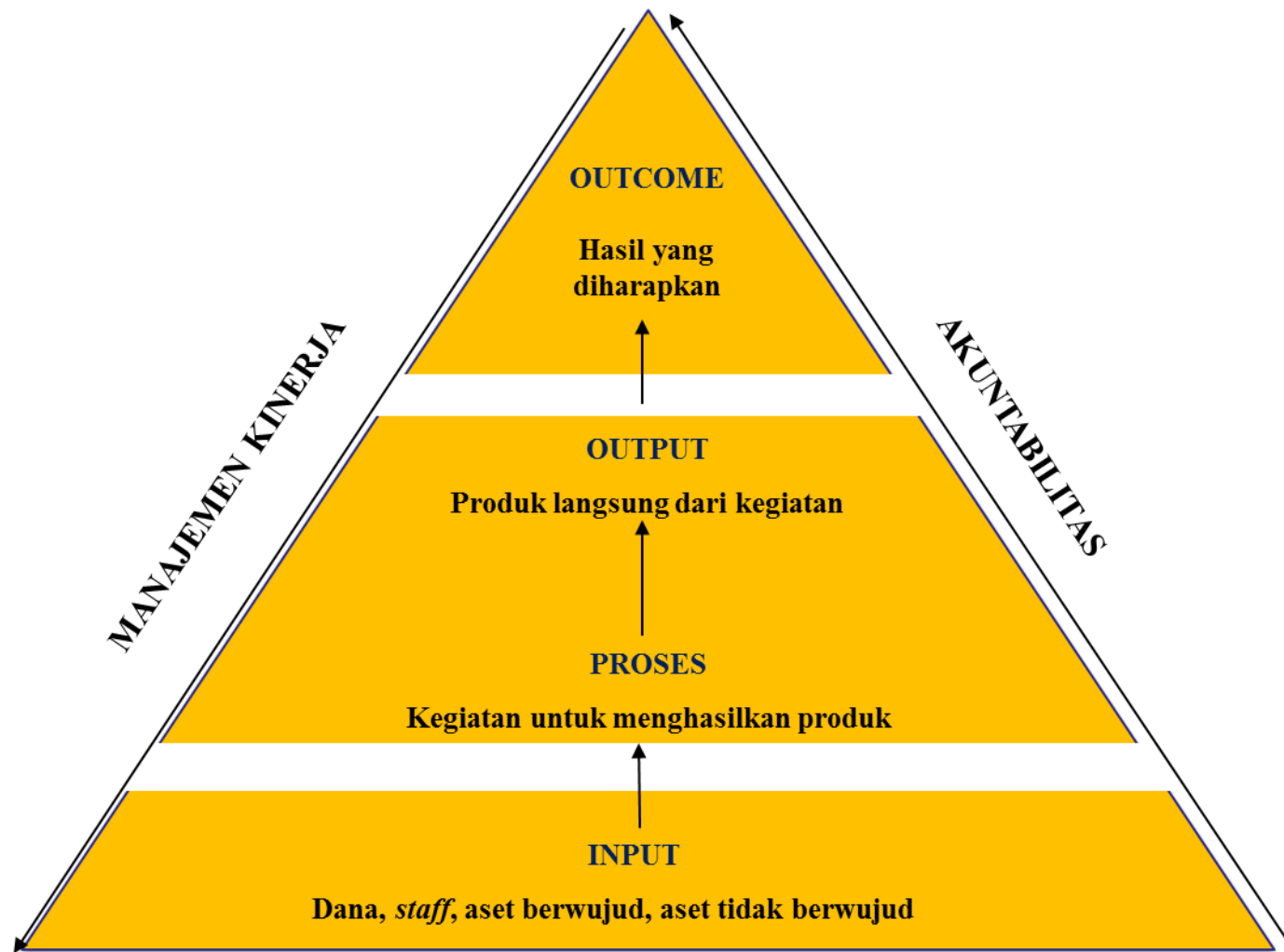
# Alur Fikir Logic Model





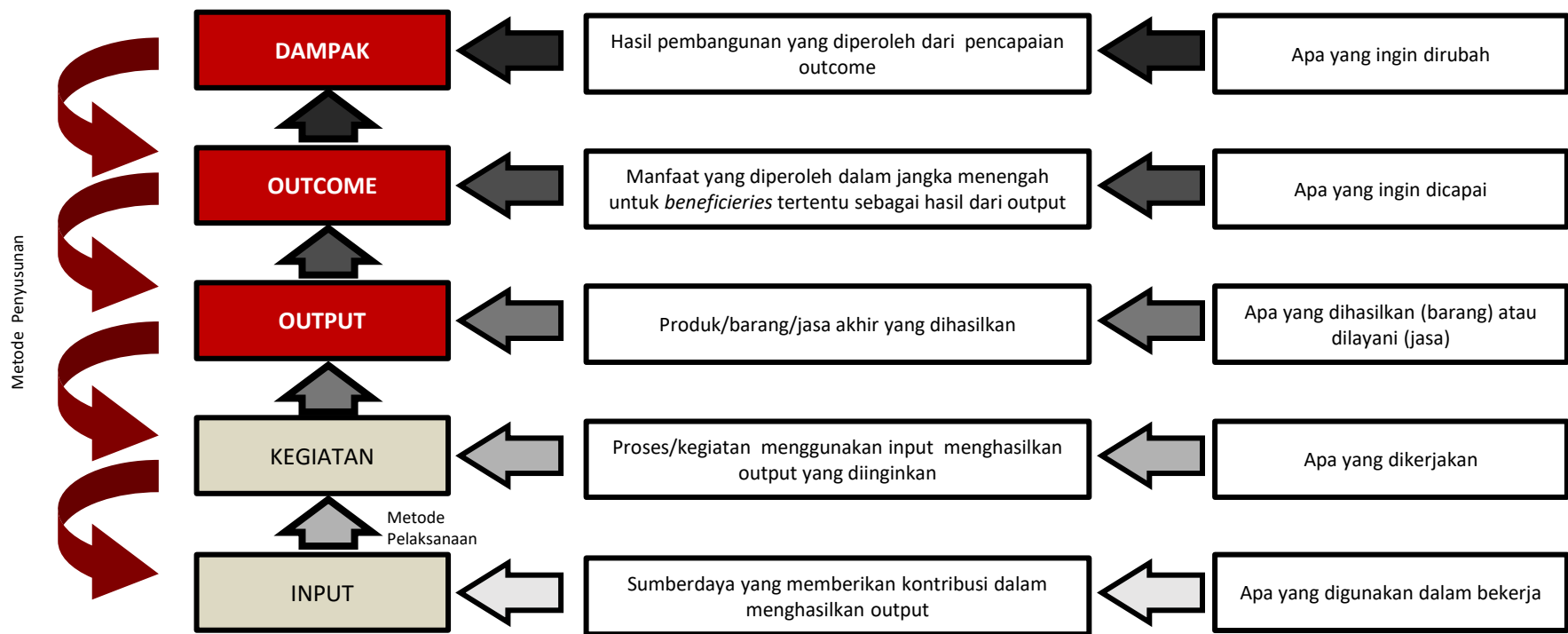
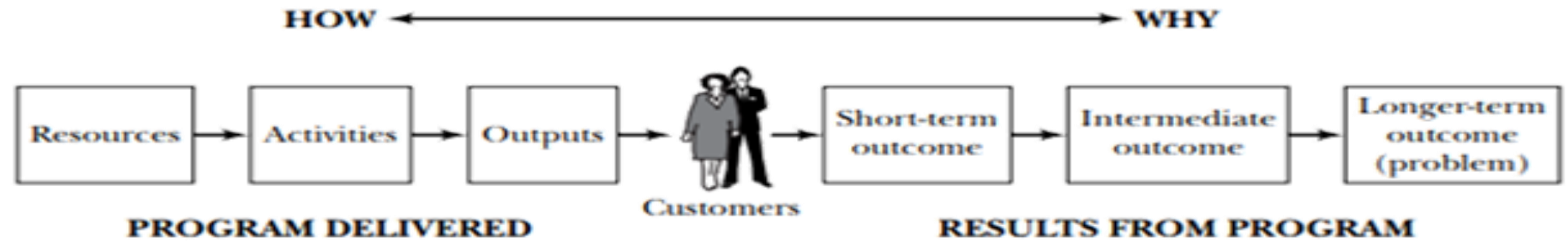
# Kinerja Organisasi





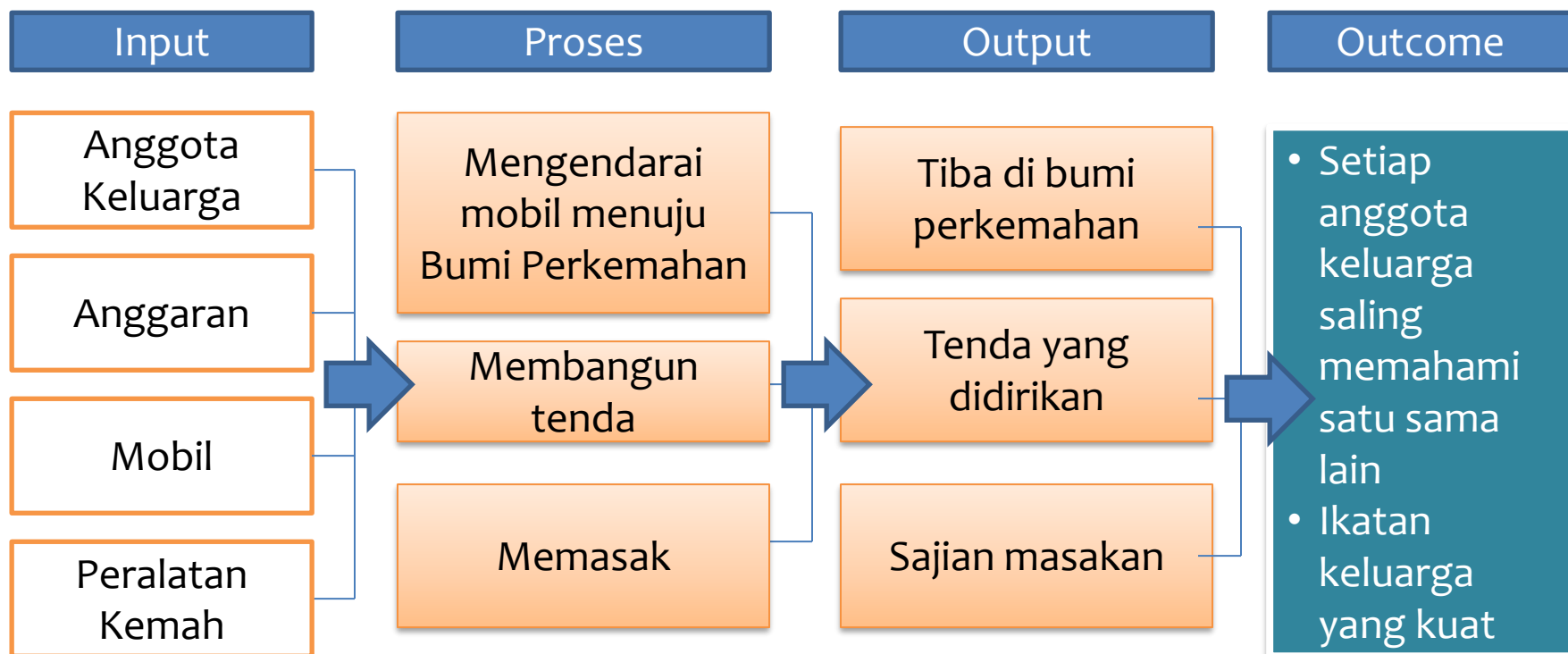
# Desain Kinerja: Logic Model, Logical Framework

Figure 1.1. Basic Logic Model





## Logic Model Sederhana “Liburan Keluarga”





## Hubungan “Jika-Maka” (If-then relationships)

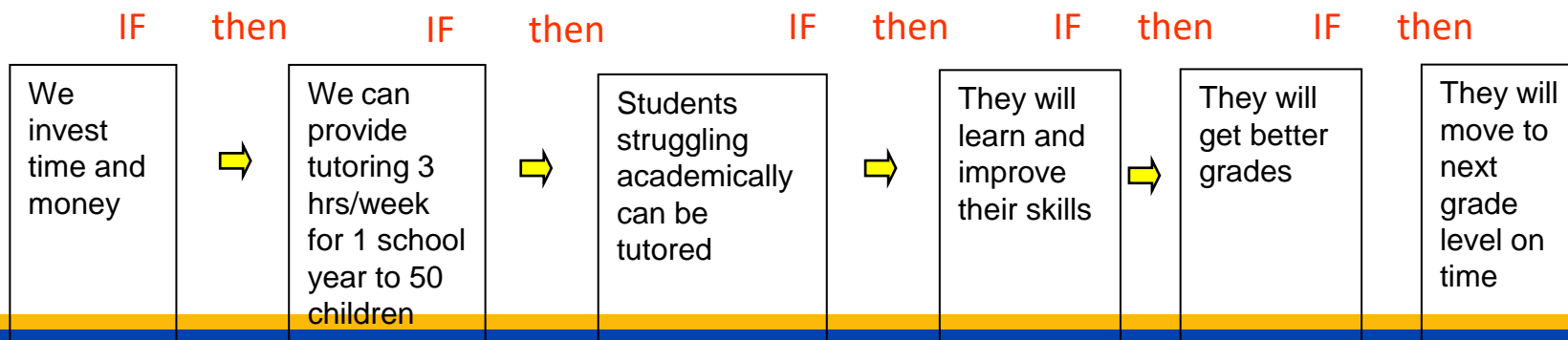
Landasan (komponen utama) *logic model* adalah serangkaian relasi “jika-maka” yang menggambarkan program-program “teori perubahan”

“A theory of change is a description of how and why a set of activities – be they part of a highly focused program or a comprehensive initiative – are expected to lead to early, intermediate, and long-term outcomes over a specified period.”

(Anderson, 2000)

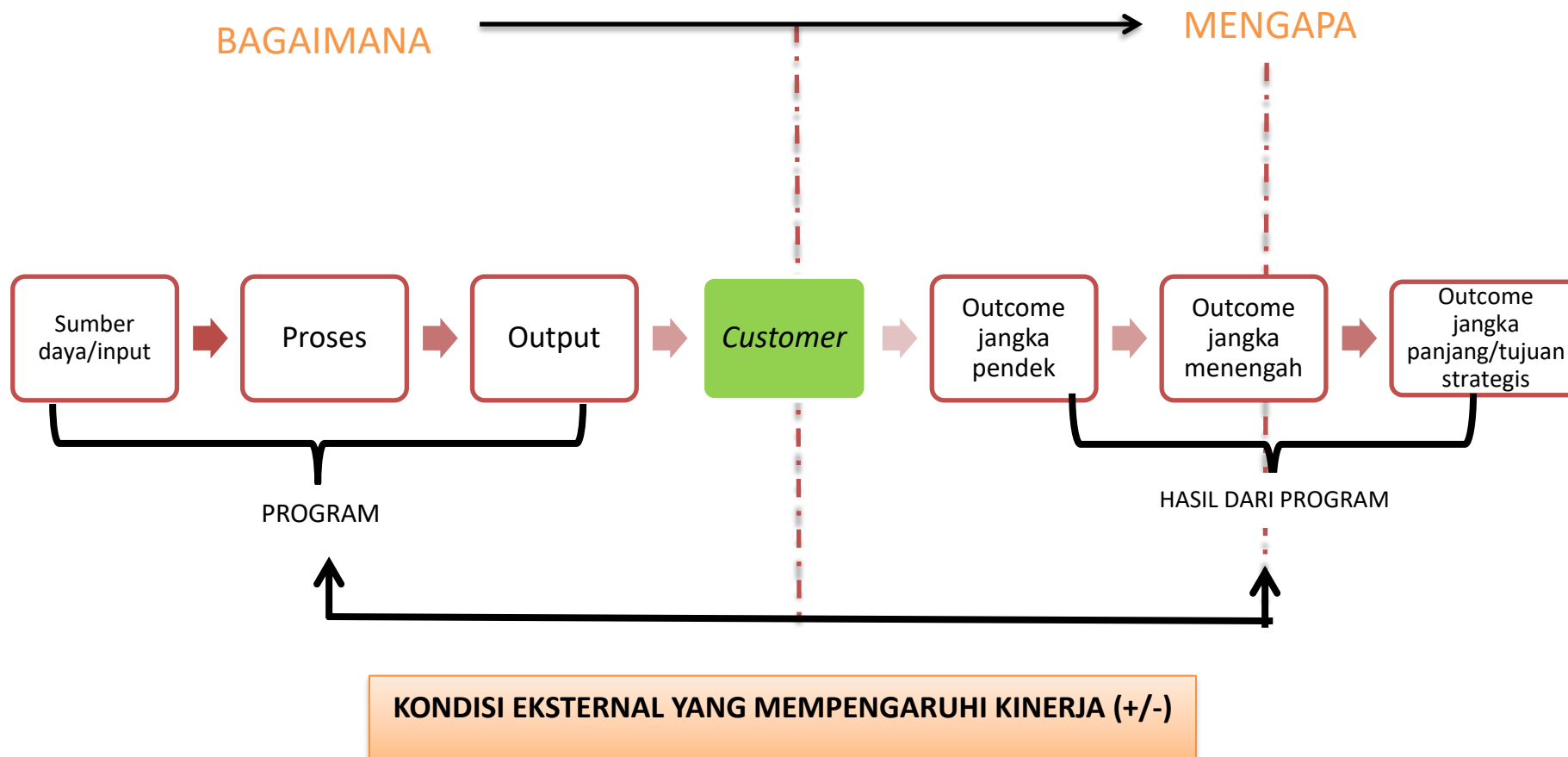
Rangkaian rantai hubungan yang logis membantu kita menemukan program apa yang seharusnya diambil untuk mencapai sasaran yang kita harapkan...

### Tutoring Program Example





## Cara Berpikir ala *Logic Model*





**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# PENYUSUNAN RENCANA KERJA



# SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

## Perencanaan

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

## Pembangunan Nasional

Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

## Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah

### Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

- RPJPN
- RPJPD
- RPJMN
- RPJMD
- Renstra K/L
- Renstra SKPD
- RKP
- RKPD
- Renja K/L
- Renja SKPD

### Pendekatan Perencanaan Pembangunan Nasional



Tematik



Holistik



Integratif



Spasial

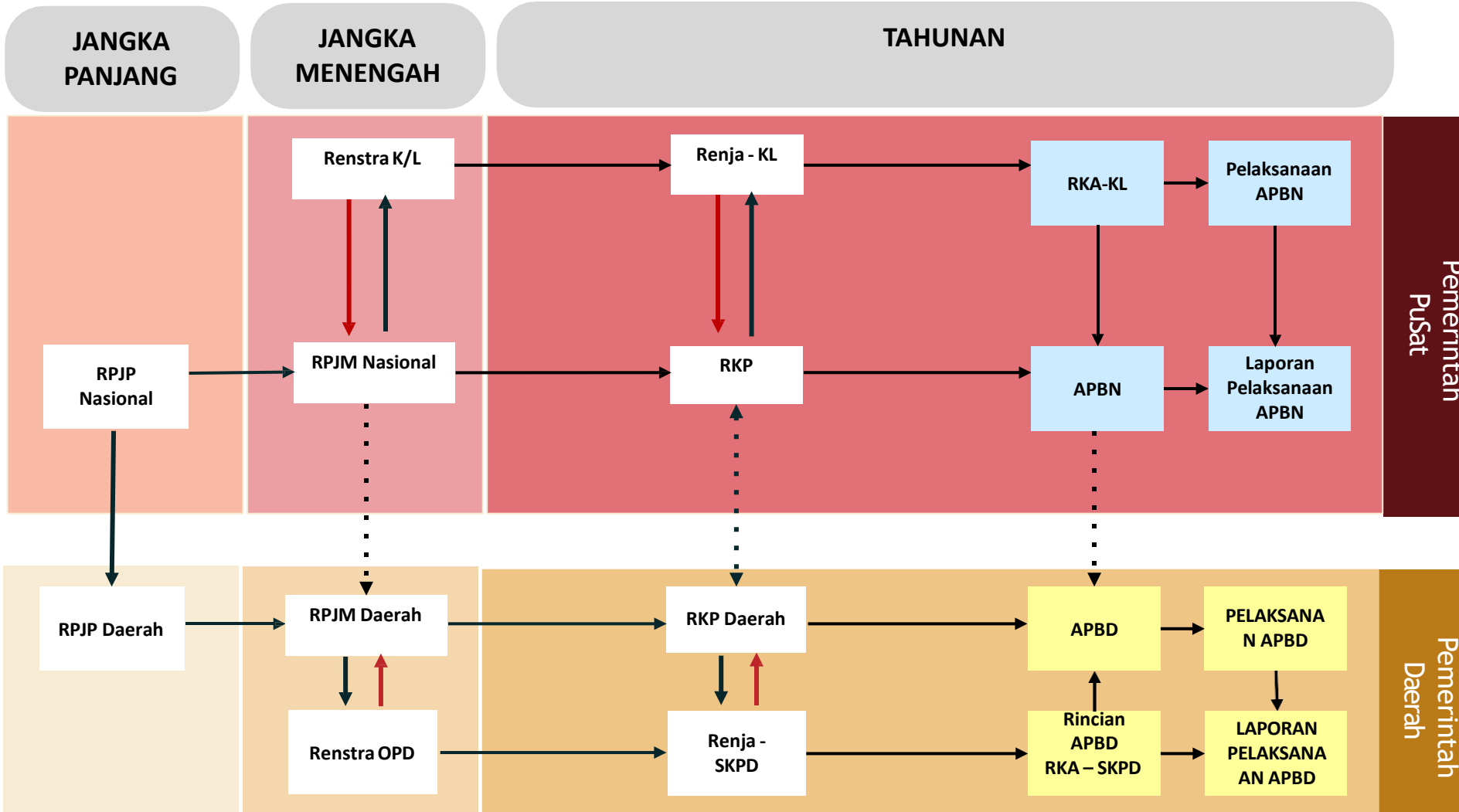
### Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*)





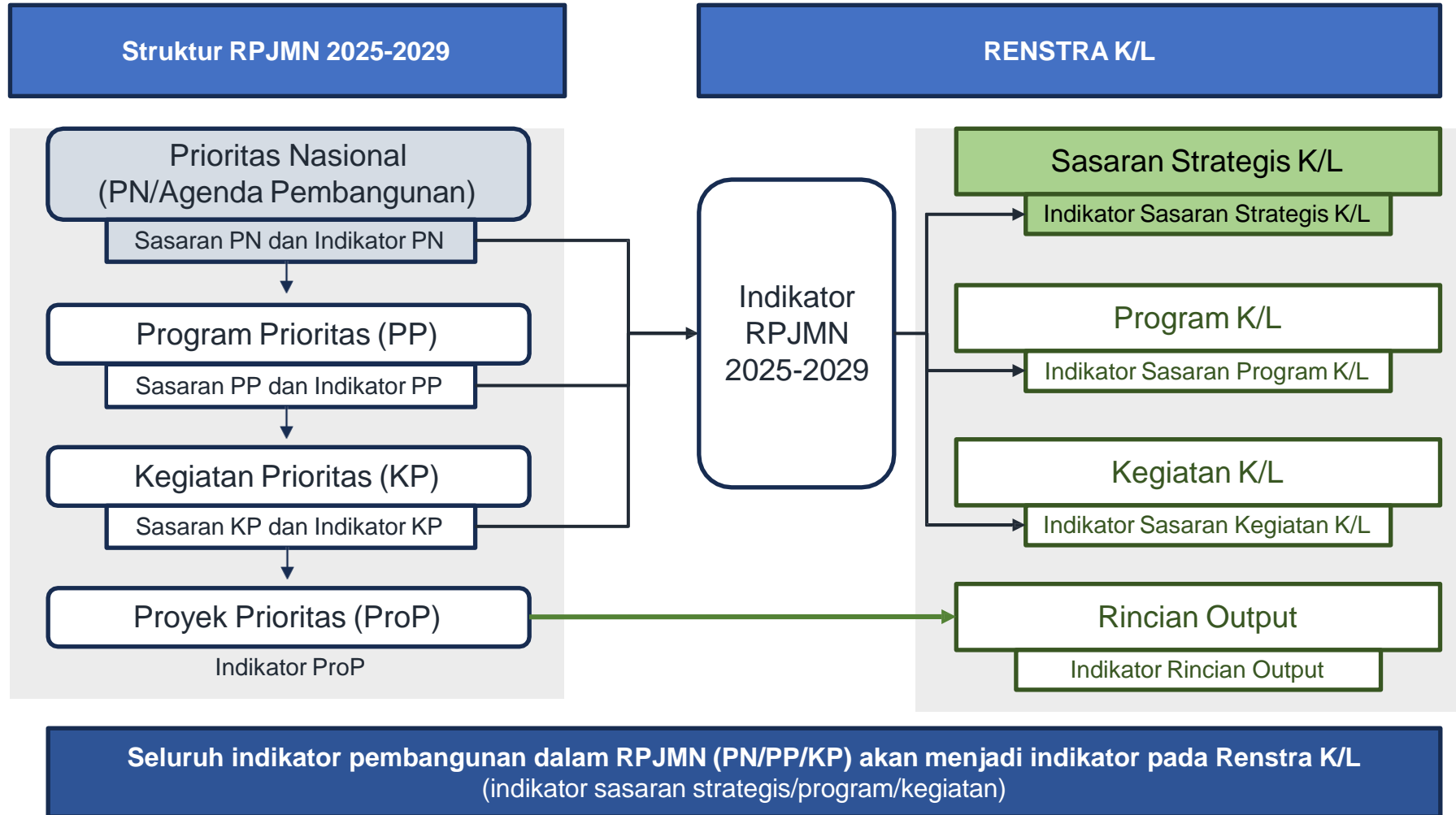
# KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



- RPJPN 2025-2045 telah disusun dan dalam tahapan pengesahan.
- RPJMN dan Renstra 2025-2029 masih dalam proses penyusunan rancangan teknokratik.
- Tahun 2025 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMN 2025-2029 sehingga Renja K/L dapat mulai disusun dengan pengguliran pada tahun sebelumnya.



# KETERKAITAN RENSTRA DENGAN RPJMN

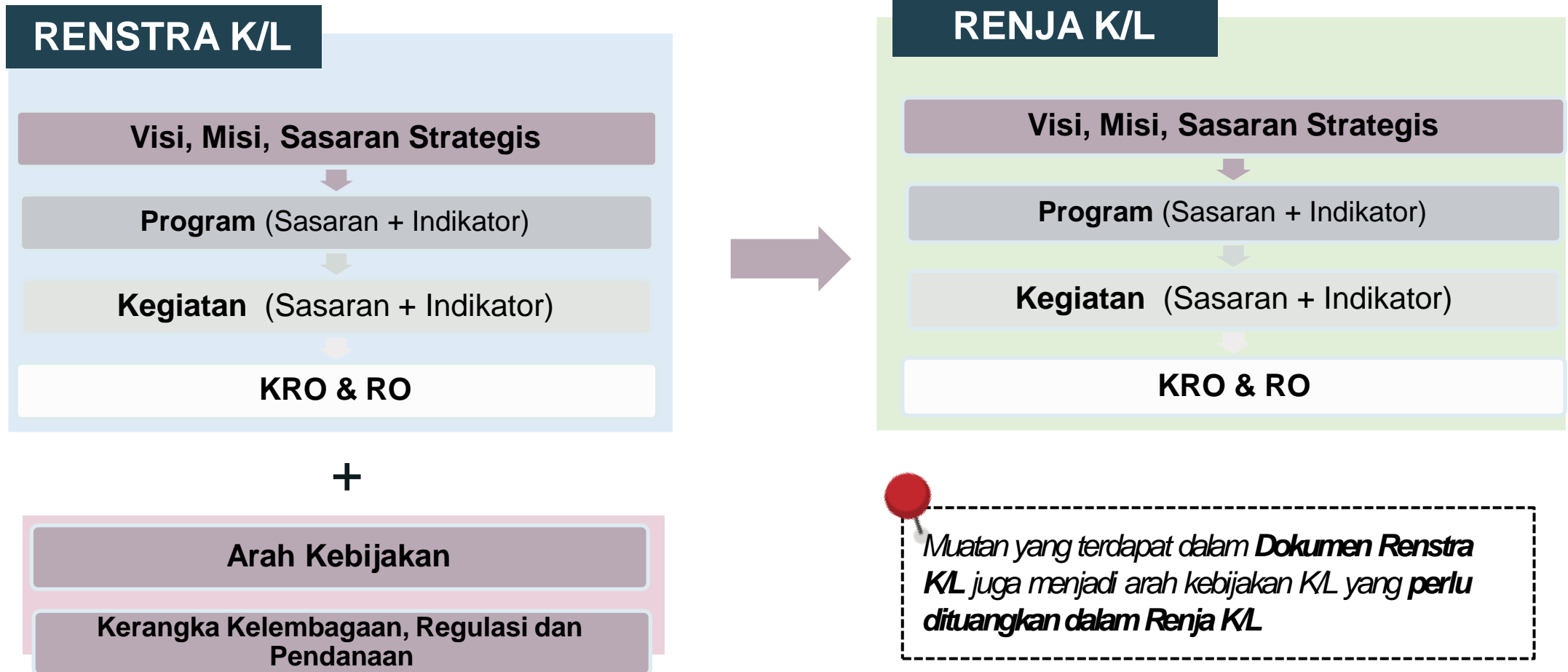


\*Sumber : Paparan Direktur EP4 dalam Kick Off Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2025 – 2029 Tanggal 27 November 2023



# KETERKAITAN RENSTRA DENGAN RENJA

Pasal 15 PP Nomor 17 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pimpinan kementerian/lembaga **menyusun rancangan Renja-K/L dengan mengacu pada Renstra K/L**, Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga.

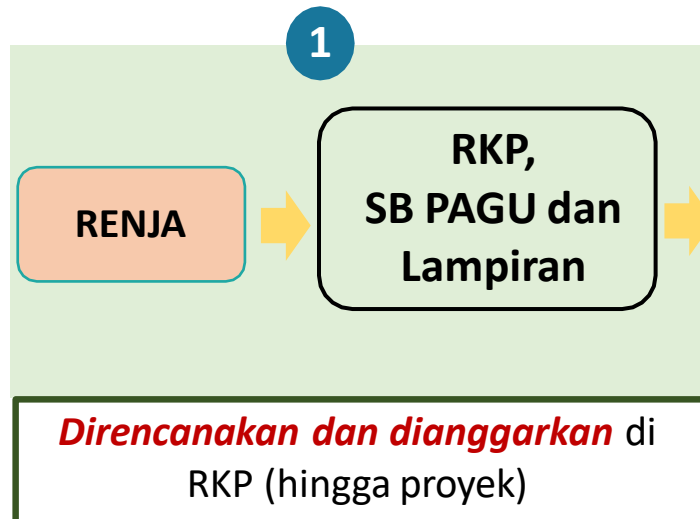


# KEDUDUKAN DAN FUNGSI RENJA K/L

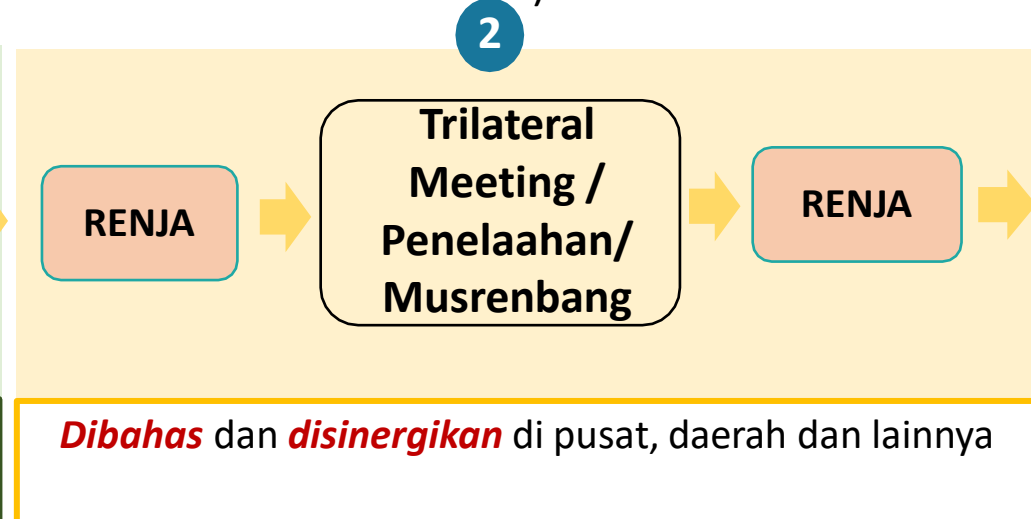


**Renja K/L** merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

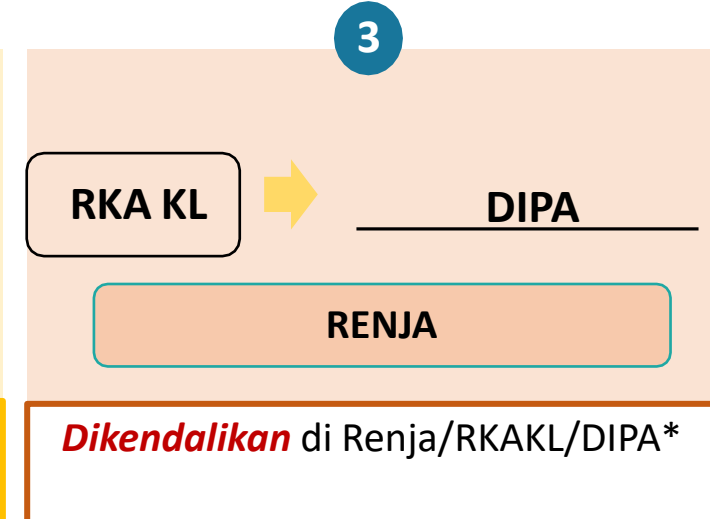
Renja K/L sebagai  
**MEDIA PENGUSULAN**  
(November-Maret)



Renja K/L sebagai **MEDIA  
PENUANGAN dan  
PENDALAMAN** rencana (Maret –  
Juni)



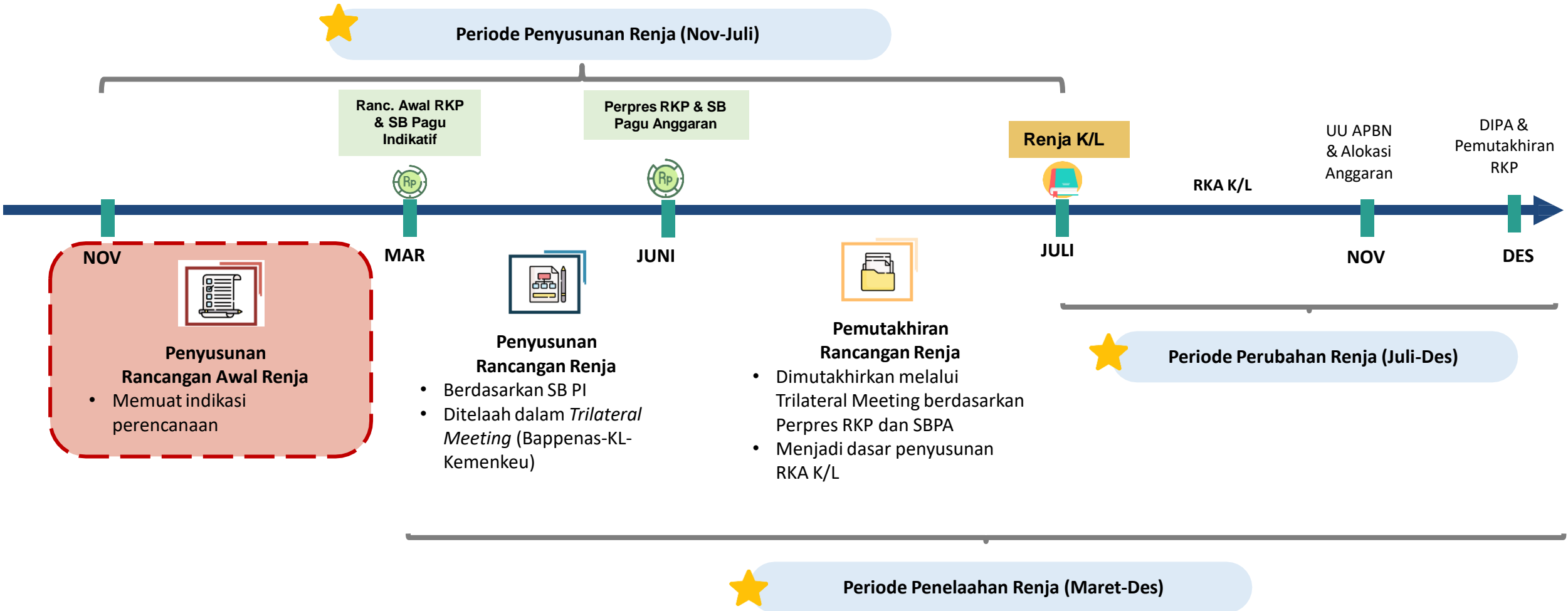
Renja K/L sebagai **MEDIA  
PENGENDALIAN** (Juni –  
Pelaksanaan)



\*) Perubahan prioritas harus mendapat persetujuan Bappenas (Renja K/L) sebelum dilakukan revisi DIPA



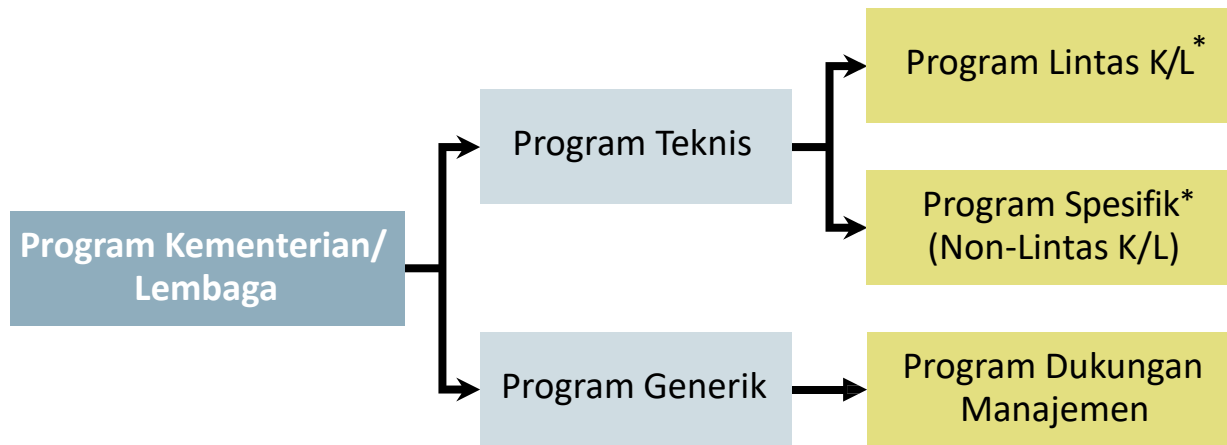
# TAHAPAN RENJA K/L



Sumber: Permen PPN No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan & Perubahan Renja K/L



# KAIDAH PENYUSUNAN RENJA K/L: MUATAN PROGRAM



➤ **Program** mencerminkan tuisi K/L yang dapat digunakan oleh 1 (satu) atau lebih UKE I.

Contoh:

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

➤ **Sasaran Program** mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara Nasional. Rumusan Sasaran Program pada Program Lintas K/L dirumuskan berbeda sesuai tuisi K/L.

*umumnya diawali dengan: “terwujudnya, tercapainya, meningkatnya ...”*

Contoh:

Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

➤ **Indikator Kinerja Program** merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif. Rumusan Indikator Kinerja Program pada Program Lintas Eselon I dirumuskan berbeda sesuai tuisi dan kontribusi unit kerja

*umumnya diawali dengan: “jumlah, persentase, luas, ...”*

Contoh:

Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

\*) Program Lintas K/L : dilaksanakan oleh beberapa K/L sesuai tugas dan fungsinya  
Program Spesifik K/L: hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) K/L yang mencerminkan tugas dan fungsi spesifik suatu K/L



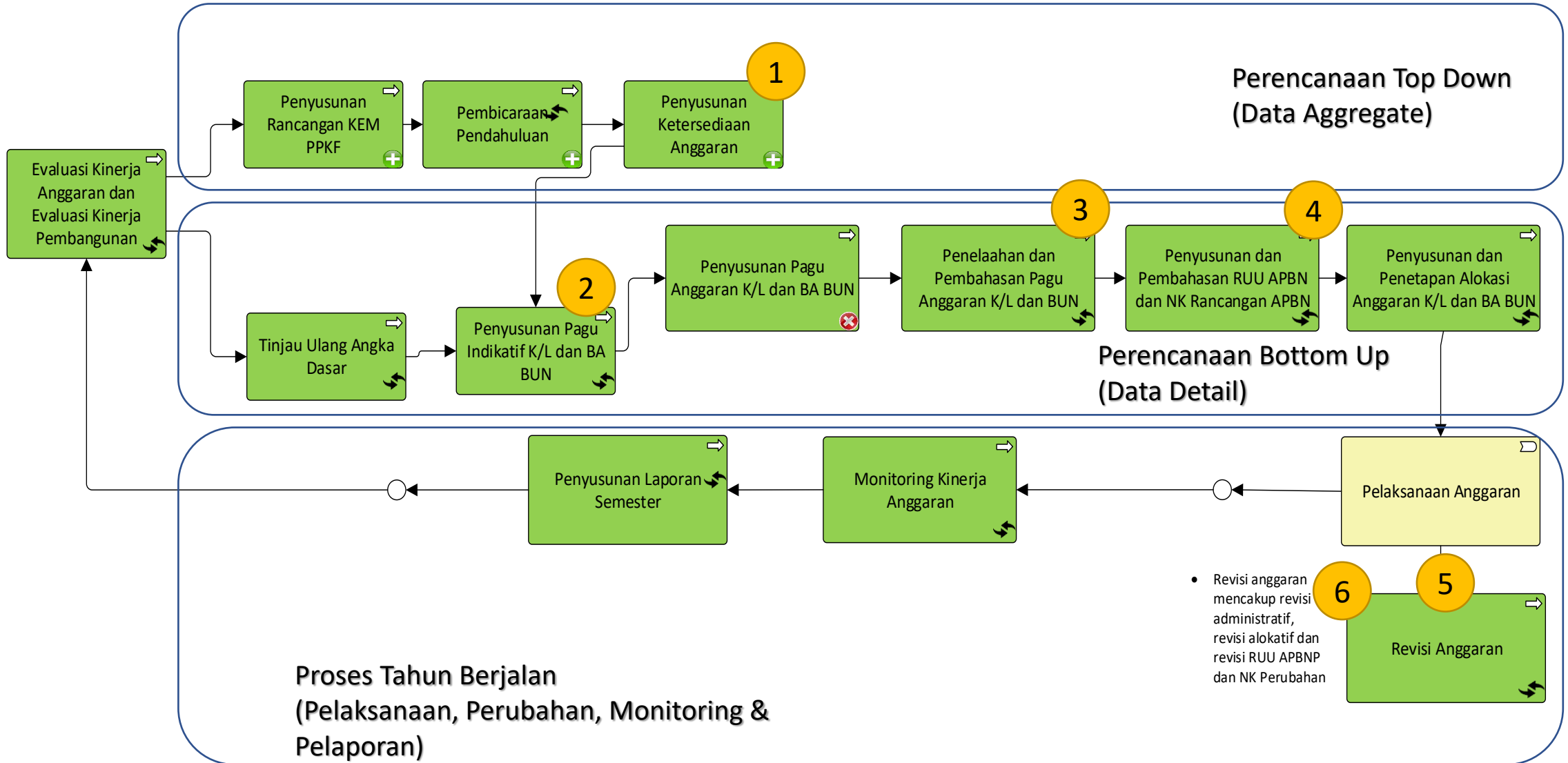
# KAIDAH PENYUSUNAN RENJA K/L: MUATAN KEGIATAN

- » Kegiatan mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam rangka menunjang Program, seperti “**Pembinaan; Penyelenggaraan; Pelaksanaan; Pelayanan**”.  
**Contoh: Penyelenggaraan Advokasi, Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif, Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat**
- » 1 (satu) Kegiatan hanya dapat **menginduk pada 1 (satu) Program**.
- » Kegiatan Kementerian/Lembaga **dapat bersifat spesifik atau lintas**
- » Kegiatan memiliki sasaran dan indikator kinerja dengan kaidah rumusan serupa dengan level Program  
**Contoh: Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba**
- » Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Kegiatan Lintas menunjuk **Koordinator/Penanggung Jawab Kegiatan:**
  - Eselon I yang membawahi Unit Kerja Eselon II Pelaksana Kegiatan Lintas;
  - Salah satu Unit Eselon II Pelaksana Kegiatan yang penugasannya disahkan melalui Surat Tugas.





# PROSES BISNIS PERENCANAAN PENGANGGARAN (Pemanfaatan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Tinjau Ulang Angka Dasar)





# KONSEP RSPP

# Pengayaan Materi

- <https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-penyusunan-sasaran-kinerja-outcome-tingkat-kementerian-negara-lembaga/>
- <https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-penyusunan-sasaran-kinerja-outcome-tingkat-eselon-i-penanggung-jawab-program/>
- <https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-penyusunan-sasaran-kinerja-outcome-tingkat-eselon-ii-satuan-kerja-tingkat-kegiatan/>

# 1. Latar Belakang Redesign Sistem Penganggaran (RSP)

## 1945-2003

Pengelolaan Keuangan Negara menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, (berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu *Indische Comptabiliteitswet/ICW*)  
**Satuan Anggaran Rutin / Pembangunan**



- **Terbitnya 3 UU Bidang Keuangan Negara**
  - UU No 17 Tahun 2003
  - UU No. 15 Tahun 2004
  - UU No. 1 Tahun 2004
- **3 Pillar Penganggaran**
  - Unified Budget
  - Performance Base Budgeting (PBB)
  - Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)



- **Penguatan Penerapan PBB**
- **Reformulasi KPJM**
- **Format Baru RKA-K/L**
- **Monev Penganggaran**
- **Reward Punishment**
- **Standar Biaya**
- **Sinergi Perencanaan Penganggaran**

## Tantangan

- ❖ Spending Better)
- ❖ Money Follow Program
- ❖ Value For Money
- ❖ Zero Base Budgeting

**EVALUASI**



## Pera turan



Keppres 42 Tahun 2002  
Pedoman Pelaksanaan APBN



PP 21 Tahun 2004 tentang  
Penyusunan RKAKL



PP 90 Tahun 2010 tentang  
Penyusunan RKAKL



PP 17 Tahun 2017 ttg Sinkronisasi  
Perencanaan dan Penganggaran

## Doku men



**DIP, DIK, DIKS**



**RKAKL/DIPA**



**RKAKL/DIPA**

## Sistem IT



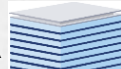
RP-DIK/S



LK-DIP



RKAKL/DIPA



RenjaKL



# 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Penganggaran



**Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal.**



**Program yang digunakan dalam dokumen Perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan.**



**Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif).**






**Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.**

# Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

## TUJUAN REDESAIN SISTEM PERENCANAAN & PENGANGGARAN

- 1 Perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel
- 2 Peningkatan informasi pada dokumen anggaran
- 3 Peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja

## REDESAIN SISTEM PERENCANAAN & PENGANGGARAN DILAKUKAN MELALUI:

-  Restrukturisasi Program
  - Restrukturisasi 12 Program menjadi 5 Program
-  Penajaman Fokus (*Refocusing*) Program
  - Peningkatan kolaborasi proses pengalokasian anggaran dengan metode pengelolaan kinerja
-  Simplifikasi Struktur Informasi Kinerja Anggaran
  - Simplifikasi struktur anggaran menjadi lebih ringkas dan fleksibel dalam pelaksanaan anggaran
  - Program -> Outcome -> Output -> Aktivitas -> Klasifikasi Rincian Output (KRO) -> Rincian Output (RO) -> Detil Belanja.

## MANFAAT



Hubungan Logika Aktivitas (Output-outcome) Dapat Tergambar Dengan Lebih Jelas



Sinergi Antar Unit Eselon I Dalam Mencapai Output Dan Outcome Program



Tidak Adanya *Overlapping* Kegiatan Dan Fokus Pada Kegiatan Yang Mendukung *Output* Program Sehingga Menghasilkan Efisiensi Anggaran

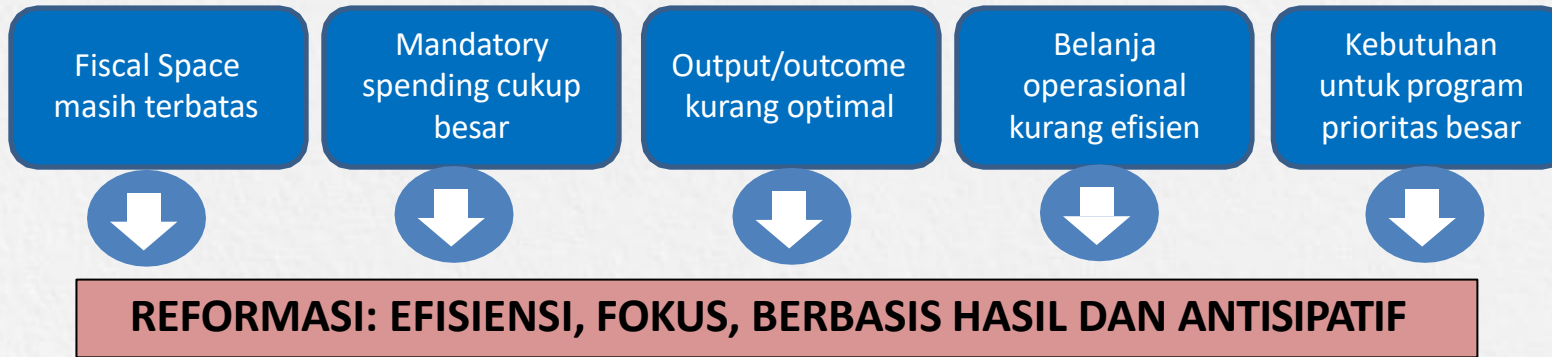


Integrasi IT Serta Penataan Organisasi Yang Lebih Baik

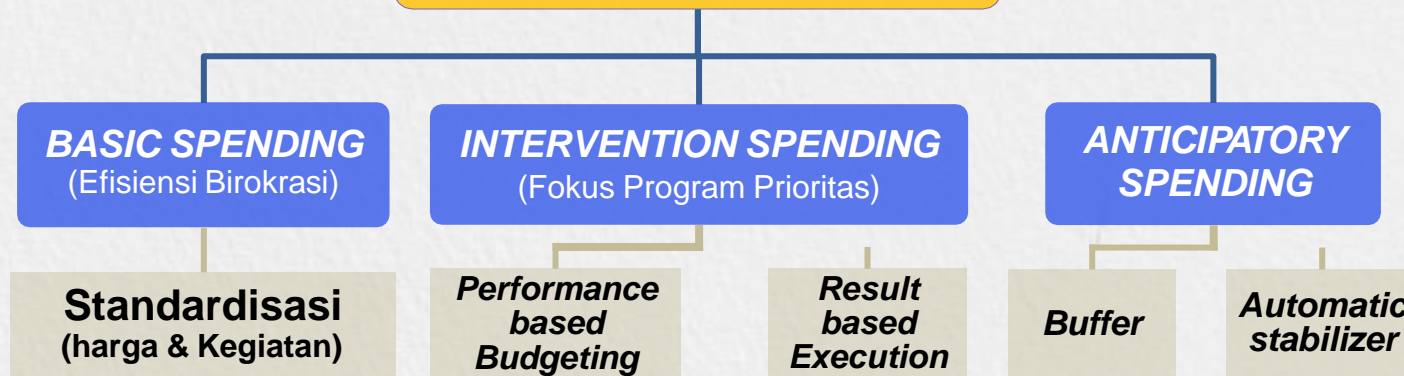
# SPENDING BETTER FOKUS MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN

Mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, di tengah ruang fiskal yang masih relatif terbatas  
(Efisiensi Birokrasi, Fokus pada program prioritas, Berbasis hasil dan Antisipatif)

## TANTANGAN PELAKSANAAN APBN



## ZERO BASED BUDGETING



## Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

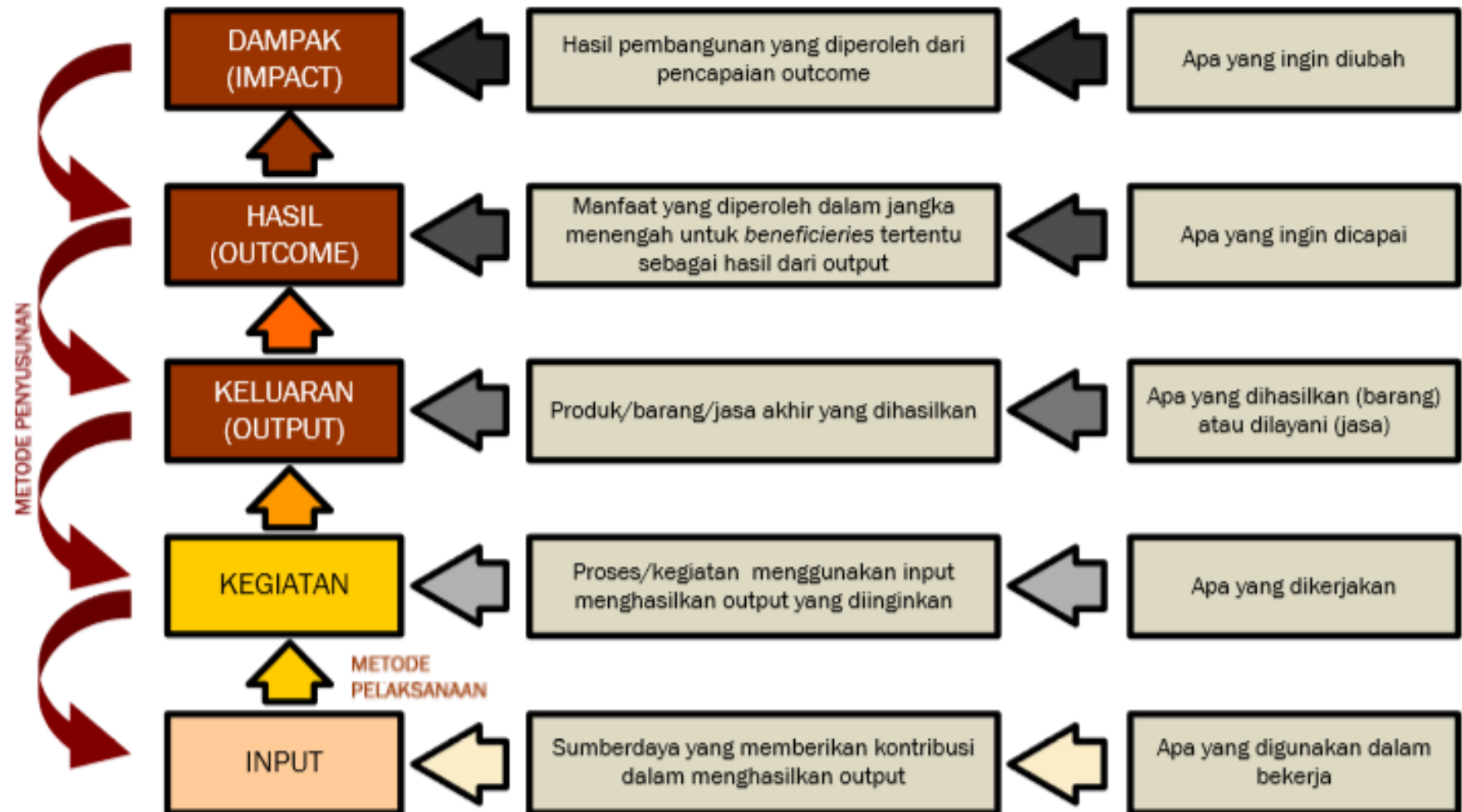
1. Belanja kebutuhan dasar diefisienkan
2. Fokus untuk dukung prioritas (*zero based budgeting*);
3. Sinkronisasi pusat-daerah, dan dengan instrumen fiskal lainnya.

## Quality control terhadap Program Prioritas

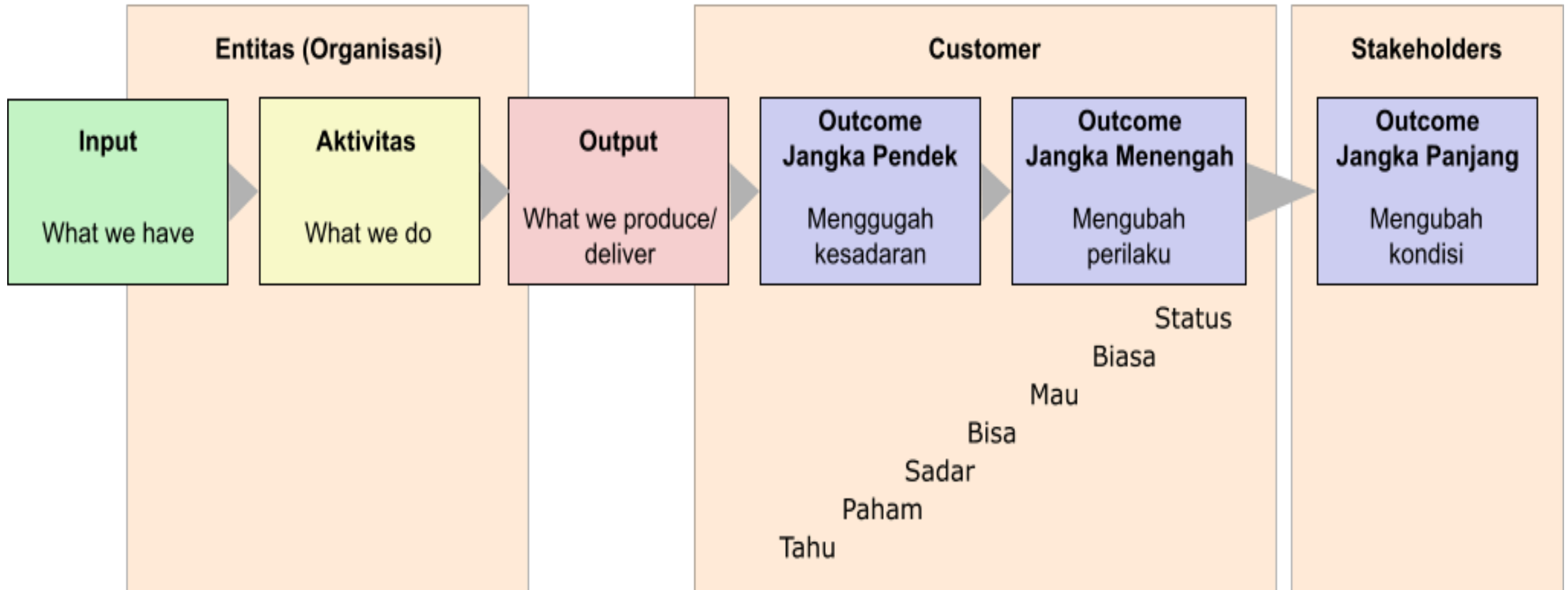
1. Program Prioritas berbasis hasil (*result based*)
2. Antisipatif terhadap ketidakpastian (*automatic stabilizer*)

# Bagan Informasi Kinerja

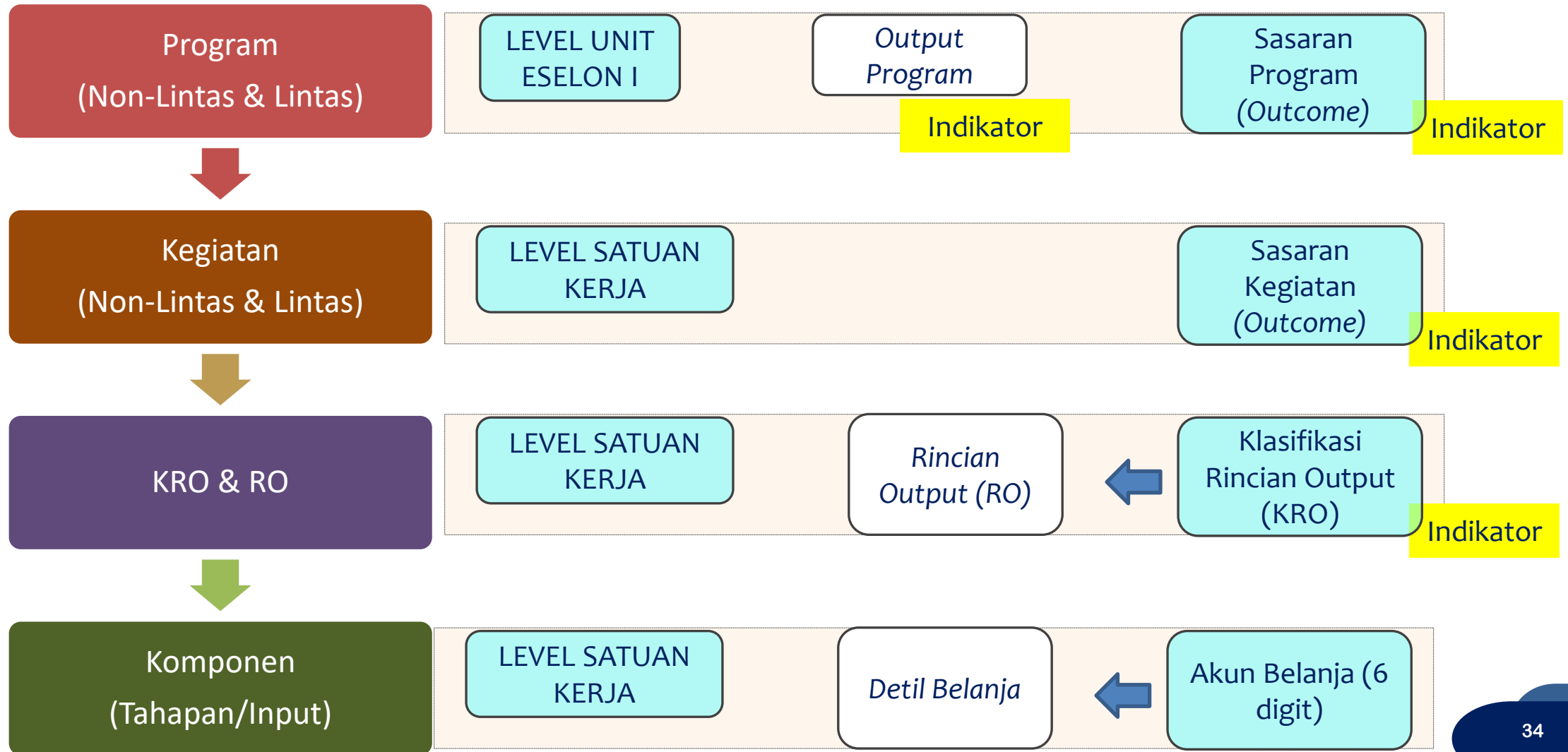
Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan diturunkan berdasarkan Logic Model Theory



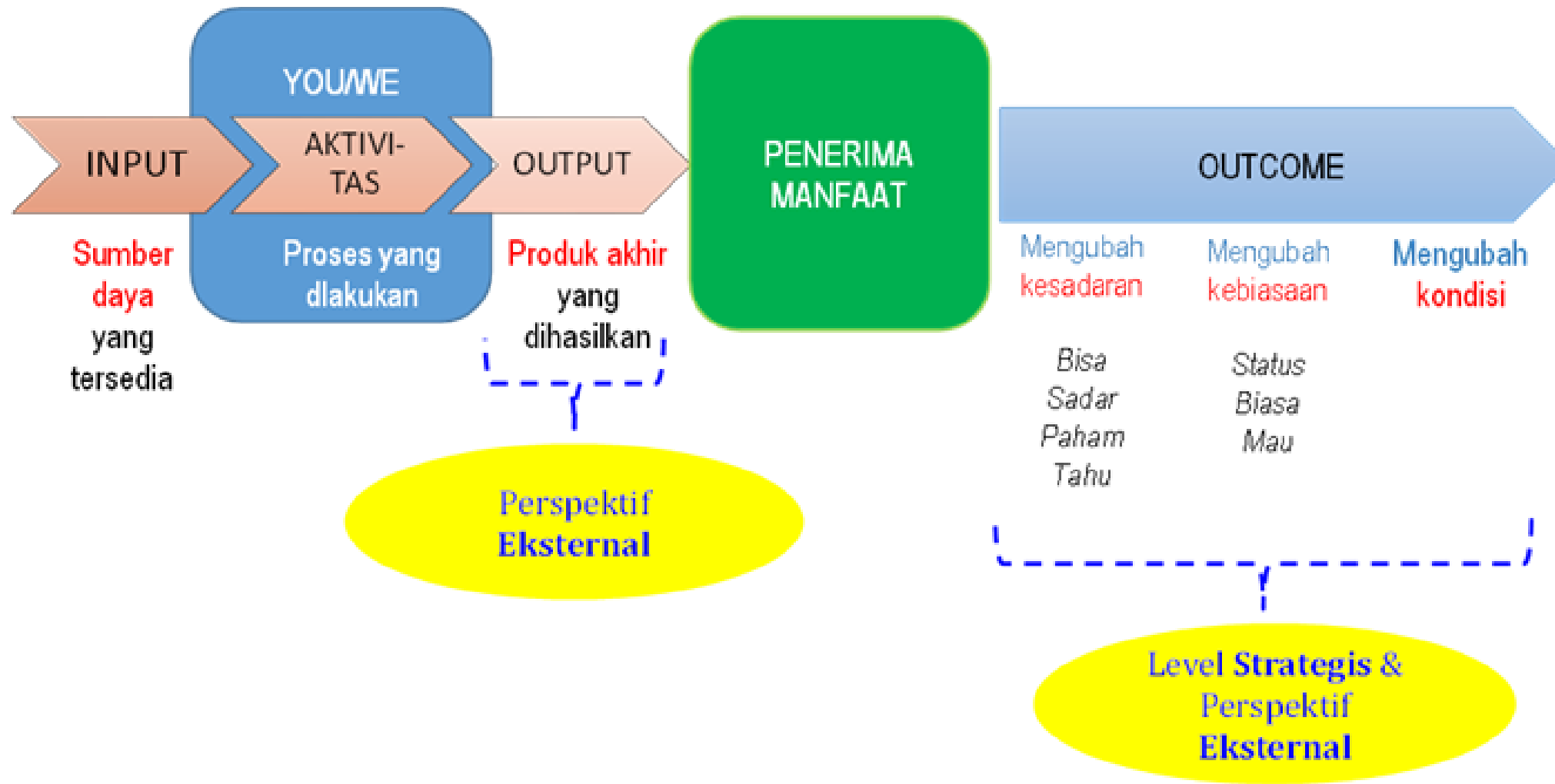
# Penyusunan Informasi Kinerja - Logic Model



# STRUKTUR INFORMASI KINERJA RKA-K/L (RSPP)



# Konsep perumusan kinerja - logic model (RSPP, Per-5/DJA/2020)



## 2. Redesain Program

### PROGRAM

Tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga, Rumusan disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN dengan berkoordinasi kepada Kementerian/Lembaga terkait

Outcome (Sasaran Program) mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai Secara Nasional. Bagi program yang digunakan bersifat lintas Kementerian/Lembaga atau lintas unit eselon I, maka rumusan Sasaran Program dan Indikator dapat dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja dan sesuai dengan kontribusinya dalam mewujudkan sasaran program dimaksud



**Program generik (program dukungan manajemen )** yaitu program yang di disain untuk mendukung pelaksanaan tugas K/L dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi).

### **Program Teknis**

Program teknis merupakan program yang didisain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP



### **Program Teknis terdiri dari 2**

**1. Program Teknis Spesifik yang dilaksanakan 1 KL,**

**Contoh : Program Kebijakan Fiskal** pada Kementerian Keuangan

**2. Program Teknis Lintas K/L a.l. :**

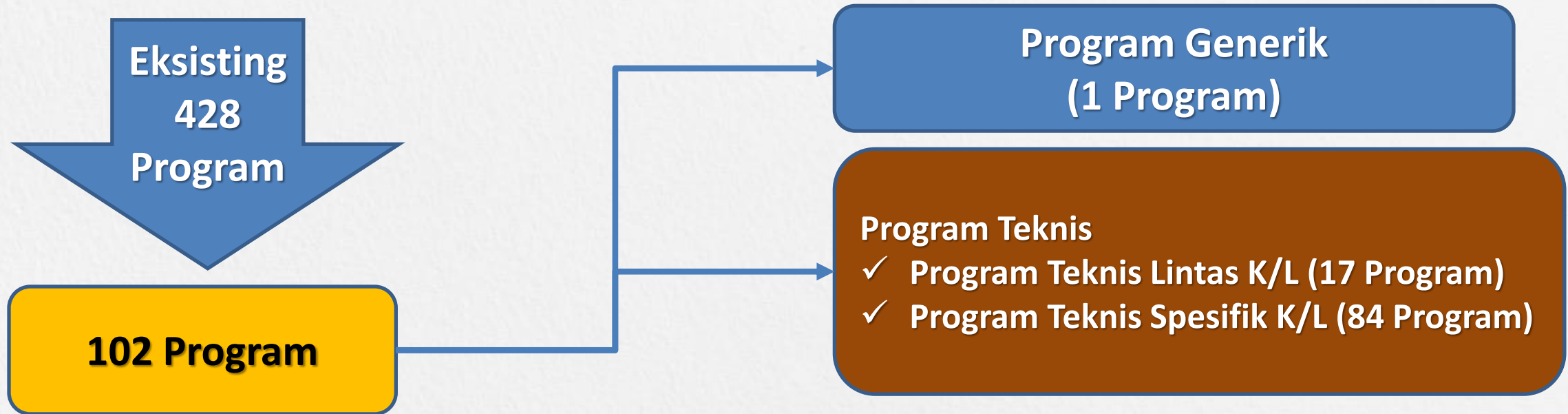
**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi,** yang dilaksanakan oleh 12 K/L

**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,** yang dilaksanakan oleh 16 K/L

**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri** yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

**Program Infrastruktur Konektivitas dilaksanakan oleh** Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan

## 2. Hasil Redesain Program Kementerian/Lembaga



**Penetapan Program TA 2021 : Surat Bersama MenKeu + MenPPN S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/2020 Tgl 8 Mei 2020 ttg Daftar Program Belanja K/L Tahun 2021**

- Program Teknis Spesifik K/L : merupakan program yang hanya ada pada K/L tertentu dan tidak terdapat pada K/L lain, dlm rangka melaksanakan 7 program Pembangunan dan Prioritas Nasional (84 Program pada 86 K/L)
- Program Teknis Lintas K/L adalah 17 program yang digunakan lebih dari satu K/L
- Secara Keseluruhan Program adalah 102  
(1 Program Generik + 17 Program Teknis Lintas K/L + 84 Program Teknis Spesifik K/L)

## 2. Redesain Kegiatan

### Prinsip Perumusan Kegiatan

Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan Unit Kerja Eselon II (dua) atau Satuan Kerja vertikal dari Kementerian/Lembaga, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran. Kegiatan dapat bersifat lintas Unit Kerja Eselon II (dua) dalam Unit Kerja Eselon I (satu) yang sama atau lintas Unit Kerja Eselon I (satu) dalam Kementerian/Lembaga yang sama.

Redesain kegiatan untuk menghindari Tumpang tindih (duplikasi) Kegiatan antar Kementerian/Lembaga serta banyaknya Kegiatan yang tidak mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga

Sejalan dengan adanya Program Lintas, maka kegiatan dapat diimplentasikan secara lintas mencerminkan Kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan Keluaran (*Output*) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan



### Jenis Kegiatan

**Kegiatan Generik** : merupakan kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit-unit Eselon II/Eselon I yang memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Diklat, dan kesekretariatan Direktorat Jenderal /Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan yang memiliki **Program Dukungan Manajemen**

**Kegiatan Teknis terdiri dari 2 : Teknis Lintas dan Teknis spesifik.**

**Kegiatan Teknis Lintas** adalah kegiatan antar Eselon II dalam satu unit eselon I atau Lintas Unit Eselon I dalam 1 K/L

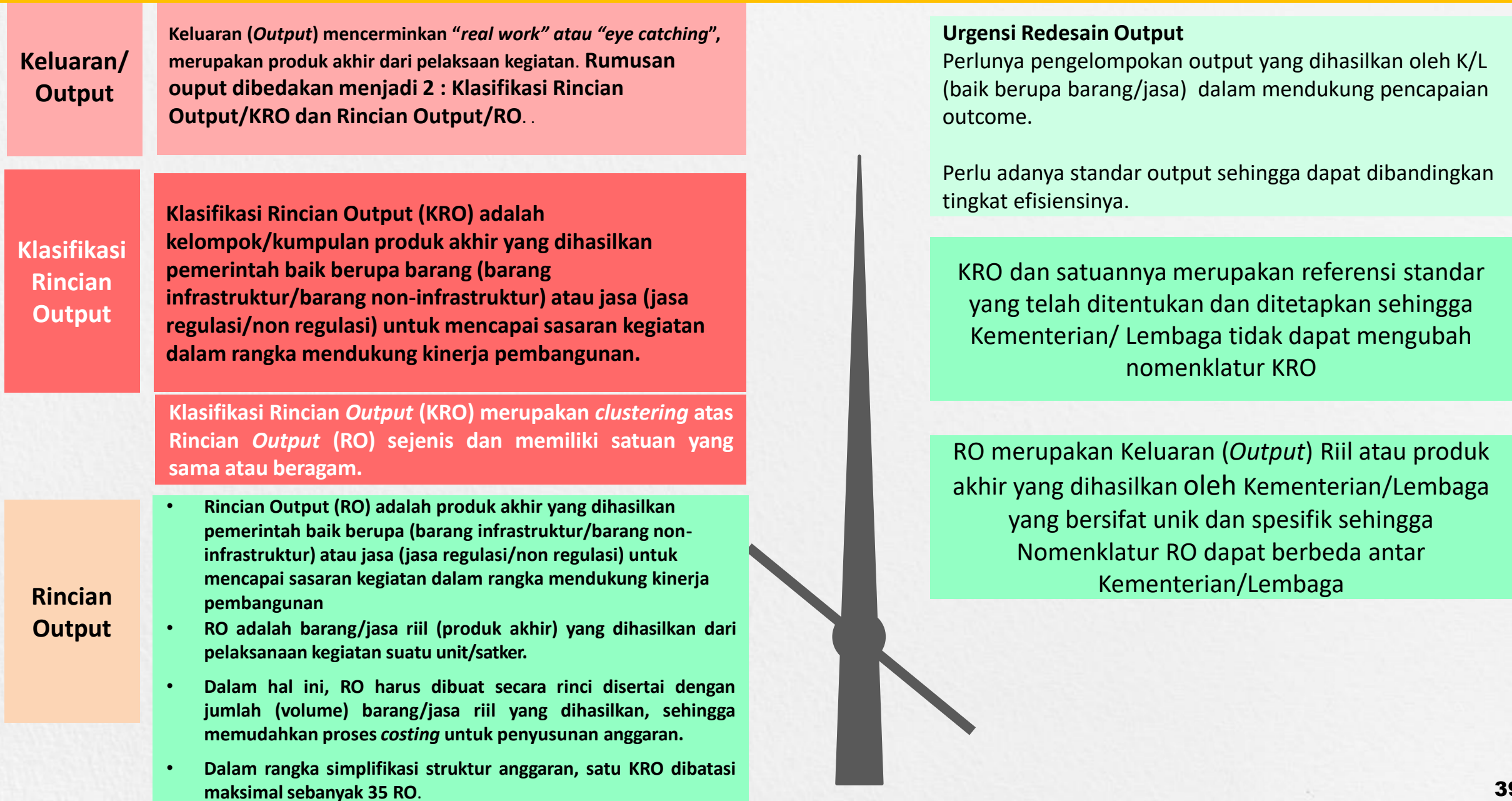
**Kegiatan Teknis Spesifik** adalah Kegiatan Spesifik Eselon II.

#### Urgensi Redesain Kegiatan :

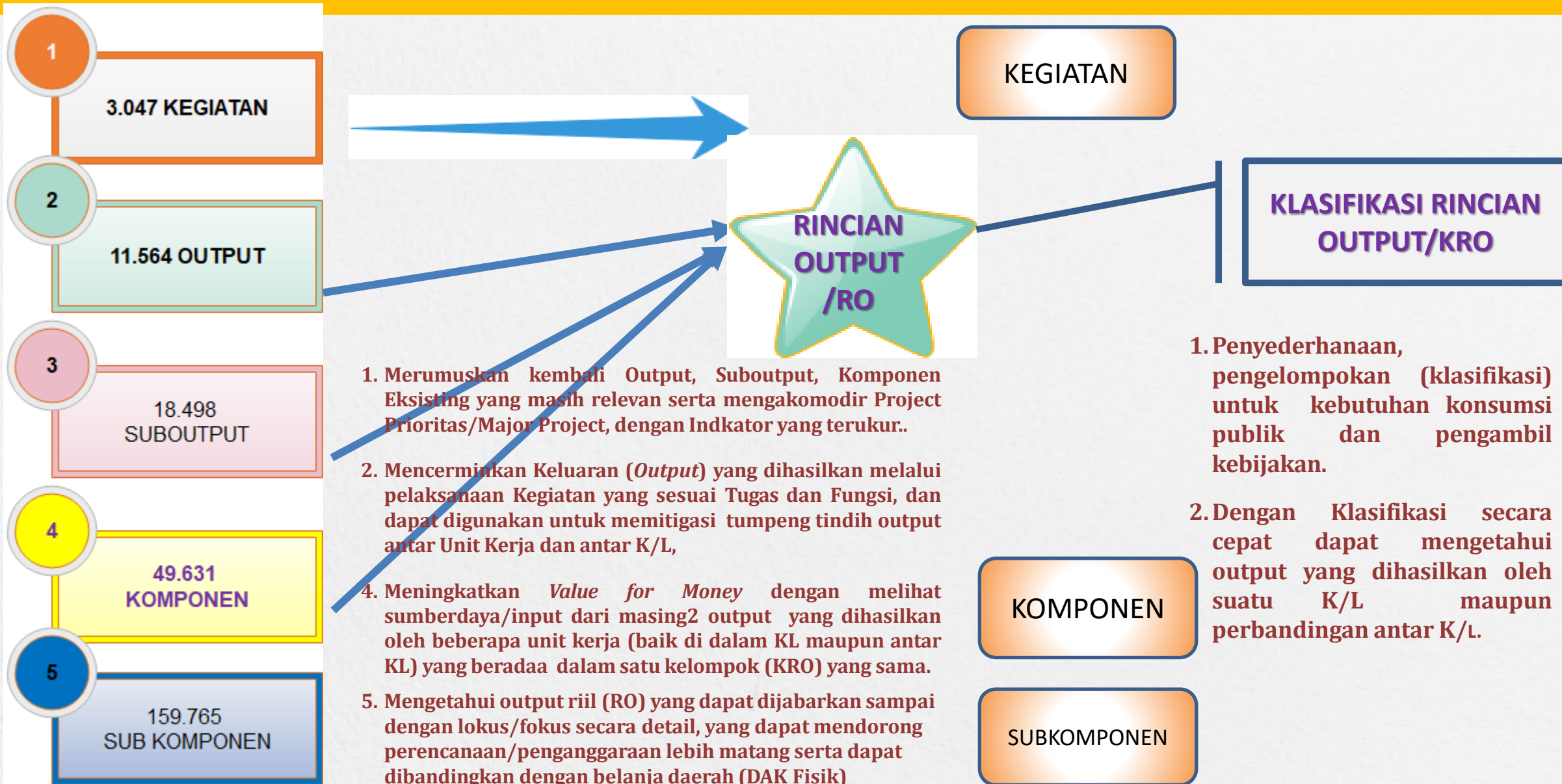
- Diperlukannya rumusan kegiatan lintas, untuk sinergi pelaksanaan kegiatan yang mempunyai keterkaitan yang kuat antar kegiatan yang yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja;
- Diperlukannya pemetaan Kegiatan yang dilakukan oleh satu unit kerja merupakan bagian dari suatu siklus/proses yang saling berurutan (sequence)
- Terdapat kegiatan yang serupa/sejenis yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja
- Memudahkan penilaian akuntabilitas kinerja dan anggaran atas pelaksanaan kegiatan

Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Kegiatan Lintas (dalam satu Unit Kerja Eselon I yang sama) memastikan akuntabilitas kinerja dari masing-masing Unit Kerja Pelaksana terhadap kegiatan lintas dengan menyusun Sasaran Kegiatan dan/atau **Indikator Kinerja Kegiatan** yang berbeda untuk masing-masing Unit Kerja Pelaksana

## 2. Redesain Keluaran



## 2. Redesain Keluaran



# Struktur Database Anggaran dan Kinerja

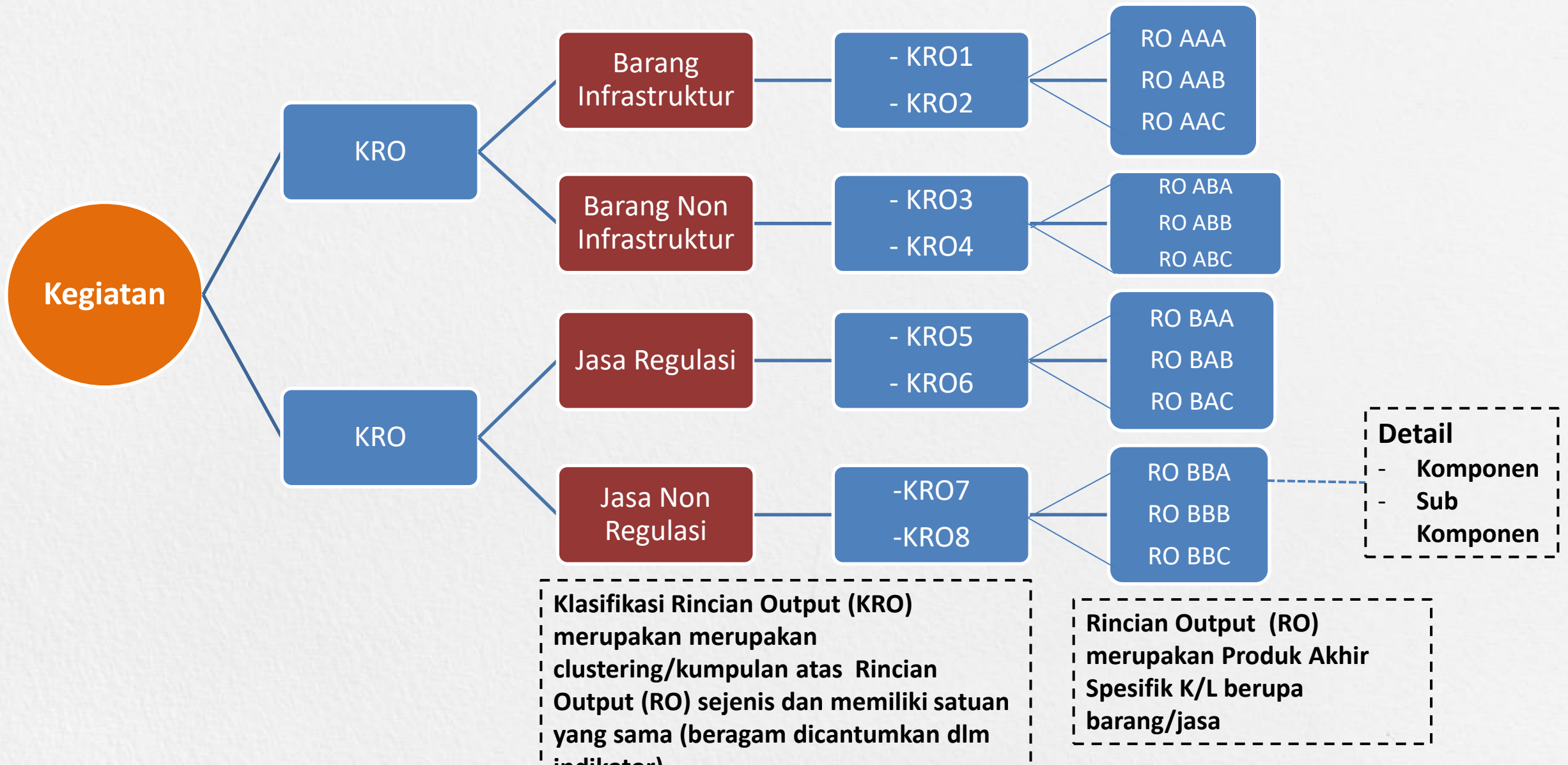
**Desain telah mengadopsi Program Lintas**

**Desain telah mengadopsi Kegiatan Lintas**

**Standardisasi KRO, dengan usulan Jumlah KRO 418 Jenis**

<i>Existing</i>	<i>Redesain</i>	<b>Informasi Kinerja</b>
<b>Program</b>	<b>Program</b>	<i>Stakeholders Perspective</i>
<b>Sasaran Program</b>	<b>Outcome</b>	
<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Indikator Outcome</b>	
<b>Output Program</b>	<b>Output Program</b>	<i>Customers Perspective</i>
<b>Indikator Output Proram</b>	<b>Indikator Output</b>	
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan</b>	<i>Internal Process dan Learning &amp; Growth</i>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	
<b>Output</b>	<b>Klasifikasi Rincian Output (KRO)</b>	
<b>Indikator Output</b>	<b>Indikator KRO</b>	
<b>Sub-Output</b>	<b>Rincian Output (RO)</b>	
<b>Komponen</b>	<b>Komponen</b>	
<b>Sub-Komponen</b>	<b>Sub Komponen</b>	
<b>Akun</b>	<b>Akun</b>	
<b>Detil Belanja</b>	<b>Detil Belanja</b>	

## 2. Desain Kegiatan - KRO – RO





### 3. IMPLEMENTASI REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN...(1)

## Implementasi RSPP dalam Pagu Indikatif TA 2021

# REDESAIN PROGRAM



Program tidak lagi mencerminkan tisi Unit Eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga.



Penyederhanaan Jumlah Program semula 428 Program menjadi 102 Program (1 Program generik, 84 Program Teknis Spesifik, 17 Program Teknis Lintas K/L)



Program hasil redesain ditetapkan melalui SB Menkeu Bappenas, dan lampiran SB pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021 telah menggunakan program hasil redesain

**Penetapan Program** : SB Menkeu Bappenas No. S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020

**Pagu Indikatif TA 2021** : SB MK Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.05/05/2020 tanggal 8 Mei 2020

#### Catatan:

Program didesain terdiri atas:

- **Program Generik (program dukungan manajemen)**  
Didesain untuk mendukung pelaksanaan tisi K/L dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi).
- **Program Teknis Spesifik**  
Didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP serta terdapat hanya pada K/L tertentu.
- **Program Teknis Lintas K/L**  
Program Teknis yang terdapat pada beberapa K/L. Contoh: Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.



### 3. IMPLEMENTASI REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN...(2)

## Implementasi RSPP dalam Pagu Anggaran TA 2021



Implementasi RSPP dalam Pagu Anggaran TA 2021 telah dituangkan dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2021

### Redesain Kegiatan

- Kegiatan tidak lagi disusun dengan nomenklatur yang identik dengan Unit Kerja Eselon II (dua) atau Satuan Kerja, namun mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran.
- Kegiatan dapat bersifat lintas Unit Kerja Eselon II (dua) dalam Unit Kerja Eselon I (satu) yang sama atau lintas Unit Kerja Eselon I (satu) dalam satu K/L

### Redesain Keluaran

- RO merupakan Keluaran (*Output*) Riil atau produk akhir yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga yang bersifat unik dan spesifik sehingga Nomenklatur RO dapat berbeda antar Kementerian/Lembaga
- Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) merupakan *clustering* atas Rincian *Output* (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau beragam (dicantumkan dalam indikator).
- KRO dan satuannya merupakan referensi standar yang telah ditentukan.



### 3. IMPLEMENTASI REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN...(3)

## Penyempurnaan RSPM Menuju Alokasi Anggaran dan Penetapan DIPA TA 2021

Berdasarkan hasil Reviu atas Implementasi RSPM dalam Pagu Anggaran masih terdapat Isu sebagai berikut:

- K/L belum secara lengkap mendetailkan rumusan RSPM ke Satker karena waktu penyusunan & penelaahan RKA-KL yang terbatas
- Masih terdapat ruang untuk *(i)* penyempurnaan Rumusan KRO/RO dan Indikator Kinerja, *(ii)* perbaikan penggunaan KRO yang kurang tepat, rumusan RO yang tidak lengkap, tidak terukur atau tidak real work, *(iii)* perbaikan satuan KRO/RO (a.l. satuan Paket) .

### RENCANA AKSI

Mengakomodir penyempurnaan/ penambahan KRO dan Satuan KRO

Reviu dan penyempurnaan rumusan RO

Sinkronisasi referensi dan informasi kinerja RSPM dalam Aplikasi KRISNA - SAKTI – SPAN dan SatuDJA



## 4.ISU-ISU STRATEGIS

### REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN... (1)



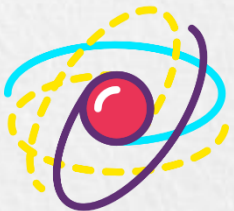
#### 1. Sinkronisasi Rumusan Indikator Kinerja RSPP dalam RKA-KL dengan target-target kinerja di dalam RKP

Menjaga kesesuaian target-target pembangunan yang tercantum dalam RKAKL 2021 selaras dengan RKP Tahun 2021



#### 2. Sinkronisasi Rumusan informasi kinerja RSPP dalam belanja K/L dengan TKDD

- ✓ Rumusan Program/Keluaran Belanja K/L dengan Belanja TKDD agar selaras
- ✓ Mewujudkan RSPP Belanja Pusat dan RSPP TKDD yang sinkron
- ✓ Anggaran dan Target Pembangunan Belanja Pusat dan TKDD dapat diintegrasikan



#### 3. Penyesuaian Peraturan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Serta Aplikasi / Sistem IT

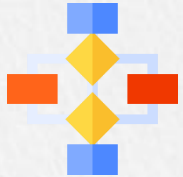
a.l.  
PMK Juksiun RKAKL/DIPA  
PMK Revisi  
PMK Standar Biaya (SBK/SBM)  
PMK Monver Kinerja Anggaran

Aplikasi a.l.  
Aplikasi SMART,SILABI, SAS, GPP, SPM/SP2D,  
eRekonLK (untuk migrasi Saldo Awal GLP secara terpusat), termasuk Interkoneksi IT dgn K/L,  
a.l. STINKO (KPK) SIPP (Setneg) Aplikasi SMART,SILABI, SAS



## 4. ISU-ISU STRATEGIS

### REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN... (2)



#### 4. Penguatan Kolaborasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran

- Penguatan verifikasi dan validasi data KRISNA, SAKTI, SPAN, dan SATU DJA untuk mewujudkan proses penganggaran yang semakin berkualitas.



#### 5. Penguatan Sinergi Lintas Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Keuangan

- Sinergi Penyusunan Kebijakan Fiskal (DJA, BKF, DJPK)
- Sinkronisasi dan konfirmasi Rencana Kebutuhan BMN K/L Tahun 2021 dengan alokasi belanja Pemeliharaan BMN dalam RKAKL tahun 2021 (DJA-DJKN)
- Informasi BMN hasil belanja K/L yang berpotensi menjadi Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya/BPYBDS (DJA – DJKN)
- Spending Review/Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2020 dalam pengalokasian anggaran TA 2021 (DJA-DJPB-Itjen)
- Evaluasi dan reviu/outlook belanja untuk kegiatan yang didanai PHLN, SBSN, PHDN dan KPBU (DJA-DJPPR)
- Evaluasi dan reviu/outlook belanja untuk kegiatan yang didanai BLU (DJA-DJPB)



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

# **STANDARISASI STRUKTUR BIAYA**

**Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan 2017**



# PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK)

Untuk mewujudkan PBK, sistem penganggaran diimplementasikan melalui RKA KL dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu :

1. Indikator Kinerja
2. Standar Biaya
3. Evaluasi Kinerja

Dengan PBK : *keputusan pengalokasian anggaran pada suatu organisasi akan disertai informasi terkait dampak dan manfaat jangka pendek dan jangka panjang (outcome), serta **meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja publik** sebagai suatu mekanisme akuntabilitas.*



# Beberapa Kendala Implementasi PBK

- a. Terbatasnya kualitas indikator kinerja dan masih lemahnya hubungan logis antara *input*, *process*, *output*, dan *outcome* dalam arsitektur anggaran;
- b. Informasi kinerja yang dituangkan dalam dokumen anggaran tersebut tidak selalu digunakan untuk pengambilan keputusan alokasi anggaran;
- c. **Sebagian besar struktur biaya untuk mencapai *output* dalam RKA-K/L Kementerian Keuangan belum menjamin kualitas *output* dan efisiensi biaya**

*“Standarisasi biaya memegang peranan penting dalam mengawal efisiensi anggaran, baik pada saat alokasi maupun pelaksanaan anggaran”*



# STANDAR STRUKTUR BIAYA

- Acuan untuk menyusun **komposisi pembiayaan suatu output/kegiatan/program** tertentu yang mencerminkan sebuah tahapan/aktivitas **dalam rangka pencapaian output dan besaran biaya masukan yang diperlukan**
- Dalam perhitungan anggaran untuk menghasilkan **suatu output** harus dapat dijelaskan hubungan **antara biaya** yang dibutuhkan dengan ekspektasi hasil yang akan dicapai sehingga akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitasnya **dapat diukur**
- Dalam penyusunan standarisasi biaya juga perlu **mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM)** sebagai salah satu faktor yang menentukan kualitas output yang dihasilkan

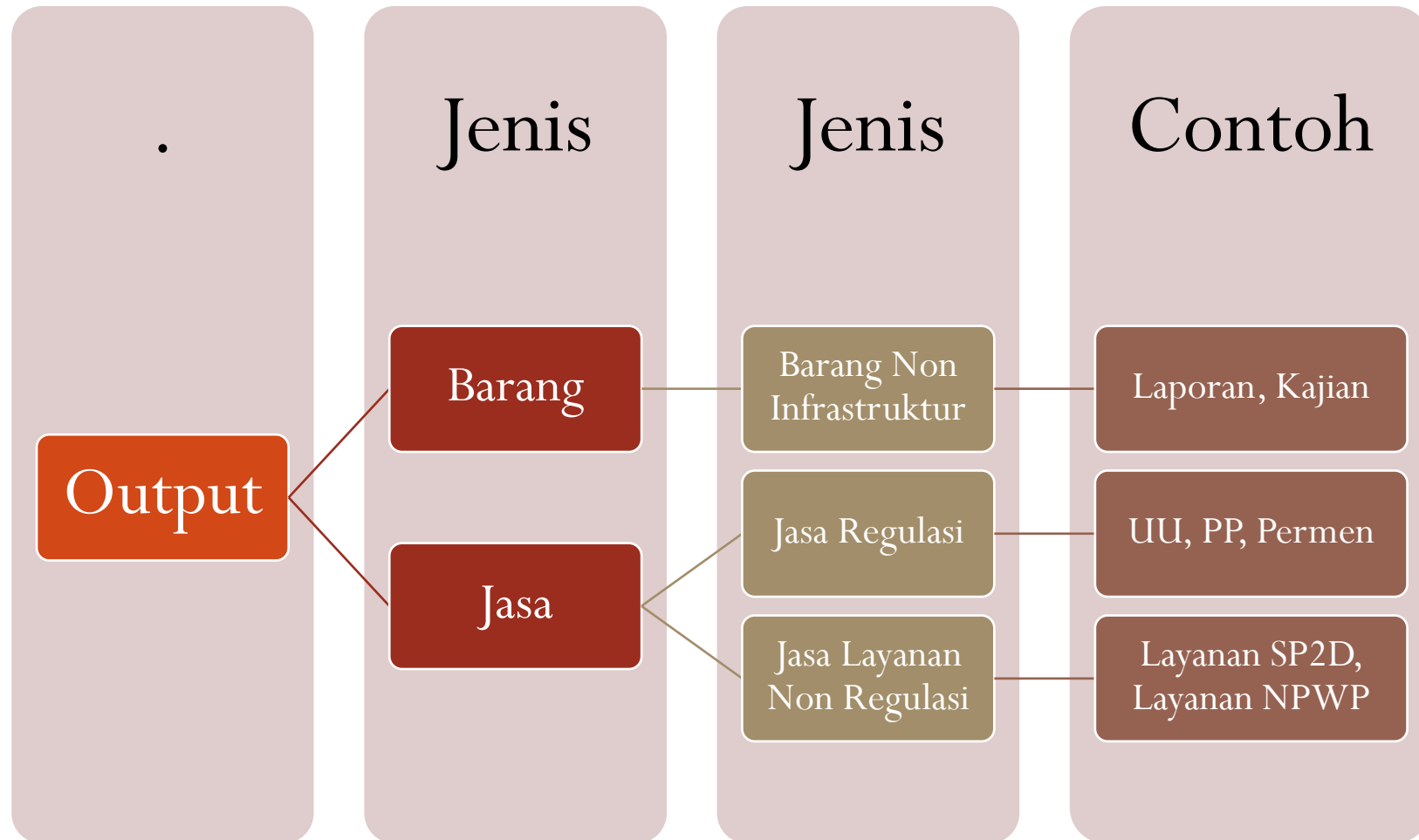
## 2. Perencanaan Kegiatan

### \* Output Kegiatan

- *Output* merupakan barang atau jasa akhir yang dihasilkan (*deliver*) dengan pendekatan kepada *customer* (pelanggan).
- *Output* mengacu pada **aktifitas** dan **input** di Form 2 untuk menjaga konsistensi.
- *Output* yang berupa Laporan Kegiatan (seperti Laporan Pelaksanaan Monev) lebih tepat dijadikan aktivitas dalam rangka menghasilkan *Output* akhir.
- Penggunaan *suboutput* dimungkinkan untuk barang atau jasa yang sejenis/serumpun. Misalnya: *Output* Jasa Konsultan dapat memiliki Sub Output Jasa Konsultan SDM, *suboutput* Jasa Konsultan Organisasi (dalam rumpun Jasa Konsultan).

## 2. Perencanaan Kegiatan

### \* Output Kegiatan



## 2. Perencanaan Kegiatan

### \* Standarisasi Output Kegiatan

No.	Jenis Output	Satuan	Komponen
1.	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	001 – Pembayaran Gaji & Tunjangan 002 – Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran
2.	Layanan internal (Overhead)	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kendaraan Bermotor</li><li>• Perangkat Pengolah Data &amp; Komunikasi</li><li>• Gedung/ Bangunan</li></ul>

## 2. Perencanaan Kegiatan

### \* Merumuskan Volume Output Kegiatan

- Untuk merumuskan volume output harus diperhatikan :
  - Jenis output – barang atau jasa
  - Satuan ukur output – sesuai karakteristik output

- Tidak general
- Spesifik
- Dapat diukur

No.	Satuan Ukur	Penggunaan
1.	Bulan Layanan	Layanan perkantoran (output generik)
2.	Unit	Peralatan dan mesin
3.	Meter (M) dan Meter persegi (m <sup>2</sup> )	Gedung dan bangunan, jalan, jembatan, jaringan
4.	Meter kubik (m <sup>3</sup> )/cc	Produksi material
4.	Laporan	Penyusunan laporan
5.	Dokumen	Penyusunan dokumen
6.	Layanan	Jasa layanan sesuai tugas dan fungsi
7.	Surat ...	Jasa pengurusan surat terkait tugas dan fungsi
8.	Perkara	Penanganan perkara
9.	Lembaga/institusi	Sosialisasi/layanan terhadap organisasi/lembaga/institusi, missal akreditasi lembaga diklat
10.	Peserta	Diklat/bimbingan teknis dsb

## 2. Perencanaan Kegiatan

### \* Komponen Kegiatan (aktivitas)

- **Aktivitas** merupakan tahapan atau elemen manajerial (*Plan-Do-Check*) atau dapat juga merupakan proses dalam menghasilkan *output*, walaupun bukan merupakan tahapan/ elemen manajerial (tidak *sequential*).
- Nomenklatur komponen/ aktivitas menggunakan kalimat kerja aktif yg mencerminkan tahapan pencapaian output.
- Aktivitas sangat penting dalam melihat hubungan logis dengan pencapaian *Output*, mengidentifikasi *non-value added activities* dan *on going-terminated activities* (*next improvement*).

## 2. Perencanaan Kegiatan

### \* Komponen Kegiatan (aktivitas)



#### CONTOH URAIAN AKTIVITAS

##### Terlalu Sederhana

**Output:** RKAKL

- Perencanaan RKAKL
- Pelaksanaan RKAKL
- Evaluasi RKAKL

Amanat TK &  
mandat UU

Amanat TK

**Output : RKAKL**

- Reviu Baseline
- Reviu Capaian output
- Penyusunan RENJA
- Penyusunan RKAKL
- Monitoring dan evaluasi RKAKL
- Implementasi PBK
- Implementasi Spending Review

*Business as  
usual*

*On Going*

**Inisiatif  
Strategis/Proyek**

*Continue/  
Terminate*

##### Terlalu Detail

**Output:** RKAKL

- Reviu Baseline
- Reviu capaian output
- Persiapan BM
- Pelaksanaan BM
- Persiapan TM
- Pelaksanaan TM
- Penyusunan RENJA
- Pembentukan Tim
- Penyusunan kebijakan
- Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran
- Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi
- Monitoring dan evaluasi belanja modal

## 2. Perencanaan Kegiatan

### \* Sifat Komponen Kegiatan

#### Komponen Utama

- Komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan output layanan birokrasi/publik satker
- Menghasilkan output teknis

#### Komponen Pendukung

- Komponen-komponen pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola layanan birokrasi/publik satker
- Menghasilkan output generik dan output internal
- Mendukung output teknis

Output :

Pelayanan dan Pengawasan  
Perpajakan

Sub Output : Pelayanan  
Perpajakan :

Komponen Utama :

Pelaksanaan Penyuluhan  
Perpajakan, Pelaksanaan  
Pelayanan dan Konsultasi  
Perpajakan

Komponen Pendukung :

Peningkatan Kualitas  
Pelayanan (Peningkatan  
Kapasitas  
PegawaiPepeningkatan  
Pengelolaan Data Prpajakan

## 2. Perencanaan Kegiatan

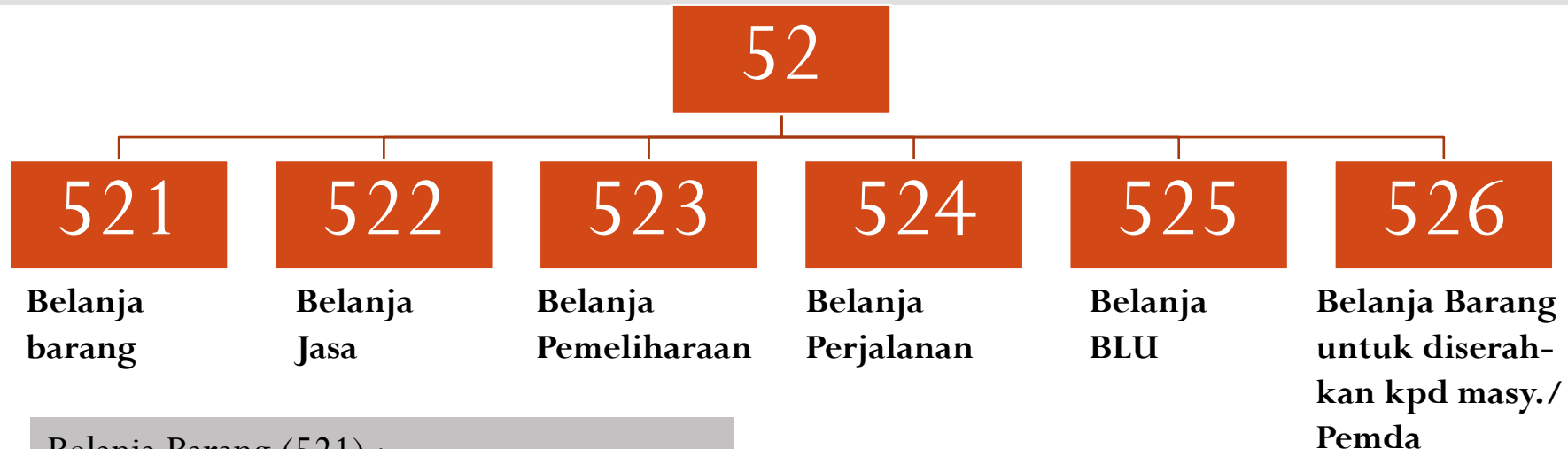
### \* Identifikasi Akun Belanja

- Sinkronisasi perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan memakai norma Bagan Akun Standar (BAS).
- Konsep *full costing*
- Konsep kapitalisasi

# Klasifikasi Belanja Barang

## **Belanja Barang (52) :**

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah termasuk transfer uang diluar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

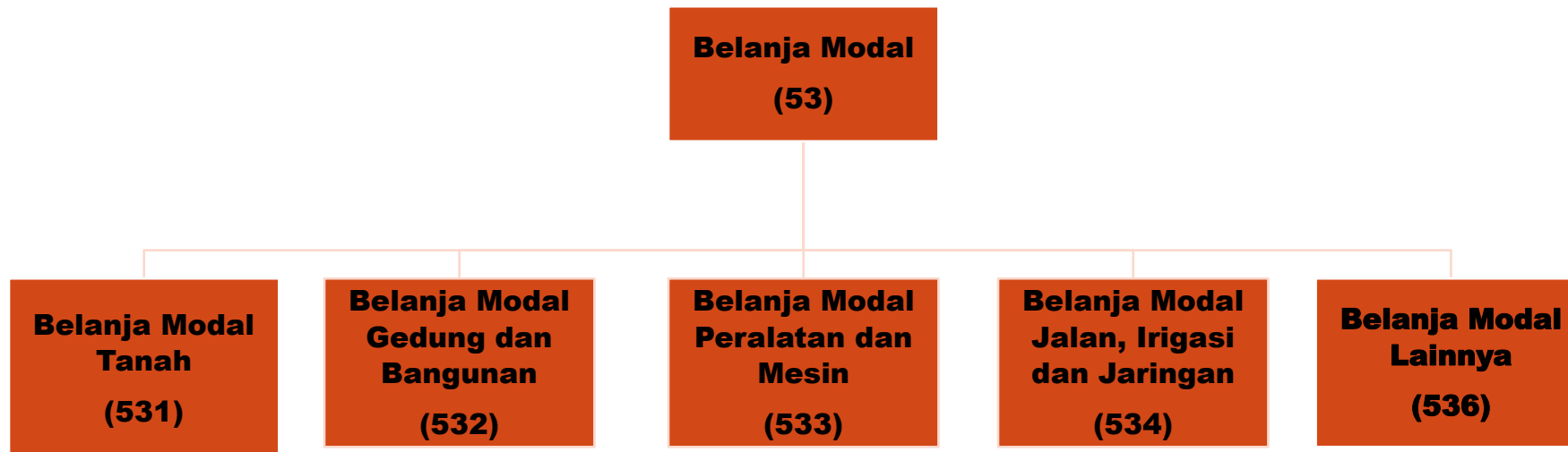


Belanja Barang (521) :

- Belanja Barang Operasional (5211)
- Belanja Barang Non Operasional (5212)

# BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan.





**TERIMA KASIH**